

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 30 Juni 2019 (tidak diaudit) dan untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 Juni 2019
dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ririek Adriansyah
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Kenanga V B-6 No. 6 Taman Duta RT 002 RW 009
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukma Jaya, Depok
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Harry M. Zen
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. H. Namin No. 48 A Kelurahan Cipete Utara
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ 021 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juli 2019



Ririek Adriansyah
Direktur Utama

Harry M. Zen
Direktur Keuangan



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2019 DAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(TIDAK DIAUDIT)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3-4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-121

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2e,2u,3,30,35	17.075	17.439
Aset keuangan lancar lainnya	2c,2e,2u,4,30,35	2.068	1.304
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,2ac,5,35		
Pihak berelasi	2c,30	2.687	2.126
Pihak ketiga		12.544	9.288
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,35	1.088	727
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	2h,6	770	717
Aset tersedia untuk dijual	2j,9	996	340
Pajak dibayar di muka	2t,25	2.435	2.749
Tagihan restitusi pajak	2t,25	798	596
Aset lancar lainnya	2c,2i,2m,7,30	8.287	7.982
Jumlah Aset Lancar		<u>48.748</u>	<u>43.268</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	2f,2u,8	2.690	2.472
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2l,2m,2ab,9,33	146.743	143.248
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2d,2k,2n,2ab,11	5.470	5.032
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,25	2.439	2.504
Aset tidak lancar lainnya	2c,2g,2i,2n,2t,2u,10,25,30,35	9.609	9.672
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>166.951</u>	<u>162.928</u>
JUMLAH ASET		<u>215.699</u>	<u>206.196</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2o,2u,12,35		
Pihak berelasi	2c,30	978	993
Pihak ketiga		14.669	13.773
Utang lain-lain	2u,35	296	448
Utang pajak	2t,25	4.787	1.180
Beban yang masih harus dibayar	2c,2u,13,30,35	13.095	12.769
Pendapatan diterima di muka	2r,14	5.516	5.190
Uang muka pelanggan	2c,30	1.359	1.569
Utang bank jangka pendek	2c,2p,2u,15a,30,35	4.517	4.043
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,2v,15b,30,35	7.370	6.296
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>52.587</u>	<u>46.261</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2t,25	1.261	1.252
Pendapatan diterima di muka	2r,14	767	652
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	2s,29	895	852
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2s,28	5.717	5.555
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,2v,16,30,35	45.616	33.748
Liabilitas lainnya	2u,2o	511	573
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>54.767</u>	<u>42.632</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>107.354</u>	<u>88.893</u>
EKUITAS			
Modal saham	1c,18	4.953	4.953
Tambahan modal disetor	2w,19	2.694	2.455
Komponen ekuitas lainnya	2f,2u,20	465	507
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	27	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		70.500	75.658
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		93.949	98.910
Kepentingan nonpengendali	2b,17	14.396	18.393
JUMLAH EKUITAS		<u>108.345</u>	<u>117.303</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>215.699</u>	<u>206.196</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (tidak audit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PENDAPATAN	2c,2r,21,30	69.345	64.368
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2c,2r,23,30	(21.790)	(21.883)
Beban penyusutan dan amortisasi	2k,2l,2m,9,11	(11.467)	(10.331)
Beban karyawan	2c,2r,2s,22,30	(6.488)	(7.035)
Beban interkoneksi	2c,2r,30	(2.737)	(1.855)
Beban umum dan administrasi	2c,2r,24,30	(3.214)	(3.294)
Beban pemasaran	2c,2r,30	(1.992)	(1.958)
(Rugi) laba selisih kurs - bersih	2q	(56)	16
Penghasilan lain-lain	2l,2r,9c	976	483
Beban lain-lain	2r,9c	(367)	(411)
LABA USAHA		22.210	18.100
Penghasilan pendanaan	2c,30	637	619
Biaya pendanaan	2c,2p,2r,30	(2.050)	(1.559)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	2f,8	41	29
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		20.838	17.189
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2t,25		
Pajak kini		(5.358)	(4.433)
Pajak tangguhan		18	51
		(5.340)	(4.382)
LABA PERIODE BERJALAN		15.498	12.807
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2f,2q,20	(46)	144
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2u,20	4	(11)
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	2f,8	(7)	-
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Laba (rugi) aktuarial - bersih	2s,28	-	-
Penghasilan komprehensif lain - bersih		(49)	133
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		15.449	12.940
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		11.078	8.698
Kepentingan nonpengendali	2b,17	4.420	4.109
		15.498	12.807
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		11.029	8.831
Kepentingan nonpengendali	2b	4.420	4.109
		15.449	12.940
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	2x,26		
Laba bersih per saham		111,83	87,80
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		11.182,87	8.780,34

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal Saham	Tambahkan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih			
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo, 1 Januari 2019		4.953	2.455	507	15.337	75.658	98.910	18.393	117.303	
Penambahan setoran modal anak perusahaan		-	-	-	-	-	-	59	59	
Akuisisi bisnis		-	-	-	-	-	-	37	37	
Divestasi anak perusahaan		-	239	-	-	-	239	-	239	
Akuisisi kepemilikan kepentingan non pengendali		-	-	-	-	-	-	25	25	
Dividen kas	17,27	-	-	-	-	(16.229)	(16.229)	(8.538)	(24.767)	
Laba periode berjalan	2b,17	-	-	-	-	11.078	11.078	4.420	15.498	
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,17	-	-	(42)	-	(7)	(49)	-	(49)	
Saldo, 30 Juni 2019		4.953	2.694	465	15.337	70.500	93.949	14.396	108.345	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal Saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih		
						Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2018		5.040	4.931	(2.541)	387	15.337	69.559	92.713	19.417	112.130
Penambahan setoran modal anak perusahaan		-	-	-	-	-	-	-	12	12
Akuisisi bisnis	2d	-	-	-	-	-	-	-	(26)	(26)
Dividen kas	2w,27	-	-	-	-	-	(16.609)	(16.609)	(10.130)	(26.739)
Laba periode berjalan	2b,17	-	-	-	-	-	8.698	8.698	4.109	12.807
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,17	-	-	-	133	-	-	133	-	133
Saldo, 30 Juni 2018		5.040	4.931	(2.541)	520	15.337	61.648	84.935	13.382	98.317

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

**Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2019	2018
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		65.103	57.888
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih		788	(48)
Penerimaan dari pendapatan bunga		637	641
Pembayaran kas untuk beban		(28.306)	(27.885)
Pembayaran kas kepada karyawan		(6.581)	(8.207)
Pembayaran pajak penghasilan dan final		(3.452)	(5.052)
Pembayaran beban bunga		(2.033)	(1.732)
Penerimaan kas lainnya - bersih		1.546	186
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		27.702	15.791
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari penjualan aset tetap	9	564	250
Hasil dari pelepasan anak perusahaan		395	-
Hasil dari klaim asuransi	9	77	71
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	8	-	9
Pembelian aset tetap	9,37	(13.621)	(13.077)
Akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh		(1.108)	(232)
Pembelian aset takberwujud	11,37	(1.006)	(1.550)
(Penempatan) pencairan aset keuangan lancar lainnya - bersih		(688)	735
Penambahan penyertaan jangka panjang	8	(126)	(166)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap		(12)	(125)
Kenaikan pada aset lainnya		(815)	(115)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(16.340)	(14.200)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	15,16	19.356	22.971
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali		59	12
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	27	(16.229)	(16.609)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		(8.538)	(10.130)
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	15,16	(6.321)	(6.304)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan		(11.673)	(10.060)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(311)	(8.469)
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(53)	150
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	3	17.439	25.145
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3	17.075	16.826

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perusahaan”) pada mulanya merupakan bagian dari “*Post en Telegraafdienst*”, yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) (Catatan 1c dan 18).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang melebihi batasan nilai tertentu serta kebutuhan Perusahaan untuk mengubah ketentuan terkait modal ditempatkan dan disetor, serta modal dasar sehubungan dengan adanya pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali dengan cara pengurangan modal, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn. No. 34 dan No. 35 tanggal 15 Mei 2018. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.0214555 tanggal 8 Juni 2018 dan Keputusan Menkumham No. AHU-0013328.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan untuk menyediakan barang dan/ atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif untuk mendapatkan/ mengejar laba guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

a. Usaha utama:

- i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

b. Usaha penunjang:

- i. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- ii. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- iii. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPPPI") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis Jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbit uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DSAP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia 11/23/bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	839/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	844/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap tertutup	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	846/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan internasional	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	948/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	31 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	191/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/10/2016	Jasa sistem komunikasi data	31 Oktober 2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Izin	No. Izin	Jenis Jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/ M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/ M.KOMINFO/16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	1004/KEP/ M.KOMINFO/2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 133 tanggal 24 Mei 2019 dan No. 54 tanggal 27 April 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Komisaris Utama	Rhenald Kasali	Hendri Saparini
Komisaris	Edwin Hidayat Abdullah	Edwin Hidayat Adbullah
Komisaris	Isa Rachmatarwata	Isa Rachmatarwata
Komisaris	Ismail	Rinaldi Firmansyah
Komisaris	Marcelino Pandin	-
Komisaris Independen	Marsudi Wahyu Kisworo	Pamijati Pamela Johanna
Komisaris Independen	Cahyana Ahmadjayadi	Cahyana Ahmadjayadi
Komisaris Independen	Margiyono Darsasumarja	Margiyono Darsasumarja
Direktur Utama	Ririek Ardhiansyah	Alex Janangkih Sinaga
Direktur Keuangan	Harry Mozarta Zen	Harry Mozarta Zen
Direktur <i>Digital Business</i> *	Faizal Rochmad Djoemadi	David Bangun
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Bogi Witjaksono	Dian Rachmawan
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Edwin Aristiawan	Abdus Somad Arief
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Edi Witjara	Herdy Rosadi Harman
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Zulhelfi Abidin	Zulhelfi Abidin
Direktur <i>Consumer Service</i>	Siti Choiriana	Siti Choiriana
Direktur <i>Strategic Portfolio</i>	Achmad Sugiarto	-

*Nomenklatur Direktur Digital Business menggantikan nomenklatur Direktur Digital & Strategic Portofolio.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary*, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

2. Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit
 Susunan Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Ketua	Margiyono Darsasumarja	Margiyono Darsasumarja
Sekretaris	Tjatur Purwadi	Tjatur Purwadi
Anggota	Ismail	Rinaldi Firmansyah
Anggota	Marcelino Pandin	Cahyana Ahmadjayadi
Anggota	Sarimin Mietra Sardi	Sarimin Mietra Sardi
<i>Corporate Secretary</i>	Andi Setiawan	Andi Setiawan
Internal Audit	Harry Suseno Hadisoebroto	Harry Suseno Hadisoebroto

3. Karyawan
 Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah 24.753 orang dan 24.071 orang (tidak diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham seri B (Catatan 18).

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 30 Juni 2019, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 51.299.033 ADS telah dicatatkan pada NYSE (Catatan 18).

Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan menerbitkan obligasi Rupiah kedua masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 16b.i).

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 16b.i).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2019	31 Desember 2018	30 Juni 2019	31 Desember 2018
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM")/ 26 Mei 1995	1995	65	65	81.323	82.650
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	19.149	16.524
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	16.020	13.053
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	11.102	10.408
PT Graha Sarana Duta ("GSD") Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	100	100	5.878	5.805
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	4.212	4.004
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	4.035	4.244
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	3.323	3.351
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat"), sebelumnya PT. Patra Telekomunikasi Indonesia Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	3.292	3.192
PT Metra-Net ("Metranet"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	1.074	782

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Presentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2019	31 Desember 2018	30 Juni 2019	31 Desember 2018
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan Network, Access Point (NAP), Voice Over Data (VOD), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5
PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin"), Jakarta, Indonesia	Jasa pembayaran - kegiatan prinsipal, kegiatan switching, kliring, dan settlement/ 3 November 2016	2016	-	100	-	298

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Presentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2019	31 Desember 2018	30 Juni 2019	31 Desember 2018
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, outsourcing, dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	9.667	7.785
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., ("Telin Singapore") Singapore	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	3.767	3.413
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa call center/ 22 September 1999	1984	100	100	2.397	2.389
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	2.159	2.128
Telekomunikasi Indonesia International Ltd ("Telin Hong Kong"), Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	1.866	1.185
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	100	100	1.688	1.339
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi/ 8 Januari 2013	2013	100	100	1.022	979

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Presentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2019	31 Desember 2018	30 Juni 2019	31 Desember 2018
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	880	1.011
PT Persada Sokka Tama ("PST"), Jakarta, Indonesia	Penyediaan sarana prasarana jaringan telekomunikasi/ 19 Februari 2019	2000	95	-	870	-
PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia pembayaran digital dan paymet gateway/ 21 Februari 2019	2019	100	-	791	-
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN"), Petaling jaya, Malaysia	Jasa satelit/ 14 Desember 2017	1996	70	70	763	832
PT Melon ("Melon"), Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	696	457
Telekomunikasi Indonesia International ("TL") S.A., Dili, Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	644	677
PT Telkomsel Karya Inovasi ("TMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi modal/ 18 Januari 2019	2019	100	-	561	-
PT Swadharma Sarana Informatika ("SSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan ATM/ 2 April 2018	2001	51	51	559	460
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	396	346
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	305	250
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	100	100	280	290

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Presentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2019	31 Desember 2018	30 Juni 2019	31 Desember 2018
PT Nutech Integrasi ("Nutech"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia sistem integrator/ 13 Desember 2017	2001	60	60	145	93
Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., ("Telkom Australia"), Sydney, Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	123	115
PT Metraplaza ("Metraplaza"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	117	168
Telekomunikasi Indonesia International Inc., ("Telkom USA"), Los Angeles, USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	76	57
Telekomunikasi Indonesia Intl (Malaysia) Sdn. Bhd ("Telin Malaysia"), Malaysia	Telekomunikasi/ 2 Juli 2013	2013	70	70	71	76
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	100	100	21	16

(a) Metra

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3, 4, dan 5 Notaris Utiok Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn, tanggal 2 April 2018, Metra membeli saham PT Swadharma Sarana Informatika ("SSI") yang dimiliki oleh Yayasan Dinar Dana Swadharma, PT Tri Handayani Utama, dan Koperasi Swadharma sebanyak 14.600 lembar atau setara dengan 36,50% kepemilikan saham dari SSI dengan nilai perolehan sebesar Rp220 miliar.

Berdasarkan Akta No. 4 Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn, tanggal 9 April 2018, Perusahaan sebagai pemegang saham Metra menyetujui mengambil bagian atas 11.837 lembar saham baru yang diterbitkan oleh SSI dengan nilai perolehan sebesar Rp178 miliar. Atas perubahan tersebut terdapat perubahan komposisi kepemilikan Perusahaan atas SSI menjadi 51% sehingga Perusahaan memiliki pengendalian atas SSI sebagai entitas anak dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp397 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp210 miliar). Harga perolehan transaksi akuisisi saham SSI lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset bersih yaitu sebesar Rp196 miliar per tanggal 31 Desember 2018, selisih tersebut dicatat sebagai *provisional goodwill*. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perhitungan *purchase price allocation* atas akuisisi ini masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(b) Sigma

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 151 dan 152 Notaris Utiék Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI., M.Kn., tanggal 28 Desember 2018, Sigma membeli saham PT Collega Inti Pratama ("CIP") sebanyak 2.493 saham (setara dengan 67% kepemilikan saham) dari PT Upperco Usaha Maxima dengan harga Rp208 miliar, dan sebanyak 111 saham (setara dengan 3% kepemilikan saham) dari PT Abdi Anugerah Persada dengan harga Rp9 miliar, sehingga kepemilikan Sigma pada CIP menjadi 2.604 saham (setara dengan 70% kepemilikan saham) sehingga Sigma memiliki pengendalian atas CIP sebagai entitas anak dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp 217 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp188 miliar). Harga perolehan transaksi akuisisi saham CIP lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset bersih yaitu sebesar Rp165 miliar. Pada tanggal 30 Juni 2019 selisih tersebut dicatat sebagai *provisional goodwill*. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perhitungan *purchase price allocation* masih dalam proses.

(c) TII

Pada tanggal 14 Desember 2017, TII membeli 49% kepemilikan saham di TSGN sebesar MYR66.150.000 atau setara dengan Rp220 miliar. TSGN bergerak dalam jasa penyediaan sistem ICT (*Information and Communication Technologies*) untuk *satellite communication services, satellite bandwidth services* dan *Very Small Aperture Terminal ("VSAT") services*. Kepentingan nonpengendali pada pihak akuisisi diukur pada nilai wajar. Berdasarkan *Sale and Subscription Agreement*, TII memperoleh hak pengendalian atas TSGN melalui penempatan dan penggantian 3 dari 5 manajemen kunci yang mengendalikan keseluruhan bisnis TSGN. Pada tanggal 25 April 2018, TII kembali membeli 21% kepemilikan saham tambahan.

Akuisisi ini akan meningkatkan sinergi serta pendayagunaan aset dan sumber daya antar perusahaan dalam rangka memberikan layanan yang lebih inovatif untuk pelanggan.

Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	<u>Total</u>
Aset	
Kas dan setara kas	21
Piutang usaha	18
Aset lancar lainnya	57
Aset tetap (Catatan 9)	770
Aset tidak lancar lainnya	20
Liabilitas	
Liabilitas jangka pendek	(422)
Liabilitas jangka panjang	<u>(155)</u>
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	309
Nilai wajar atas kepentingan nonpengendali	(157)
<i>Provisional goodwill (Catatan 11)</i>	<u>68</u>
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	220

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(c) TII (lanjutan)

Pada tanggal 2 Juli 2013, TII mendirikan Telin Malaysia dengan kepemilikan 49% dan pada tanggal 18 April 2018, TII kembali membeli 21% kepemilikan saham yang dimiliki oleh Compydyne Telecommunication Systems Sdn, Bhd dengan harga perolehan MYR8.764.798 atau setara dengan Rp31 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp16 miliar). Sehubungan dengan akuisisi saham Telin Malaysia, TII mengakui *provisional goodwill* Rp61 miliar (Catatan 11).

Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bisnis antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang telekomunikasi.

(d) Dayamitra

Berdasarkan akta Notaris Jimmy Tanal, SH. M.Kn., No. 22 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dari para pemegang saham PT Persada Sokka Tama ("PST"), disetujui pengalihan hak atas saham PST kepada Dayamitra dari Nyonya Rahina Dewayani dan Nyonya Rahayu sebesar masing-masing 2.559.000 dan 6.000 lembar saham sehingga Dayamitra memiliki 2.565.000 lembar saham atau 95% kepemilikan di PST dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp1.113 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp1.092 miliar). Harga perolehan transaksi akuisisi saham PST lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset bersih yaitu sebesar Rp415 miliar. Pada tanggal 30 Juni 2019 selisih tersebut dicatat sebagai *provisional goodwill*. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perhitungan *purchase price allocation* masih dalam proses.

Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 30 Juni 2019, total pendapatan dan laba sebelum pajak yang dicatat oleh PST dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp72 miliar dan Rp19 miliar.

PST adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sewa menara. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis perusahaan.

(e) Telkomsel

Berdasarkan akta notaris Bonardo Nasution, S.H. No. 12 tanggal 18 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Telkomsel Mitra Inovasi ("TMI"). Telkomsel membayarkan modal awal sebesar Rp550 miliar untuk 549.989 lembar saham dari 550.000 lembar saham keseluruhan.

Berdasarkan akta notaris Bonardo Nasution, S.H. No. 13 tanggal 21 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya"). Telkomsel membayarkan modal awal sebesar Rp25 miliar untuk 2.499 lembar saham. Pada tanggal 22 Februari 2019, Telkomsel mengalihkan asetnya kepada Finarya sebesar Rp150 miliar dan menerima 14.974 lembar saham atas kompensasi pengalihan harta tersebut.

(f) Jalin

Berdasarkan akta notaris Fifiidiana, SH.,S.S.,M.Kn. No. 2 tanggal 19 Juni 2019, perusahaan menjual 67% kepemilikan saham di Jalin kepada PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") senilai Rp395 miliar. Perusahaan telah menerima secara penuh pembayaran atas transaksi penjualan tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juli 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun belum Berlaku Efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2020:

- **PSAK 71: Instrumen Keuangan**
PSAK 71 merevisi persyaratan terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk model kerugian kredit ekspektasian untuk menghitung penurunan nilai aset keuangan, dan persyaratan akuntansi lindung nilai secara umum yang baru. PSAK ini tetap mempertahankan kriteria pengakuan dan penghentian pengakuan instrumen keuangan yang sebelumnya diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 71 menggantikan ketentuan akuntansi instrumen keuangan yang saat ini diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
- **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**
PSAK 72 menetapkan kerangka yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan dan seberapa besar suatu pendapatan dapat diakui. PSAK ini memperkenalkan model lima langkah untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan kepada semua kontrak dengan pelanggan. PSAK ini juga memberikan panduan spesifik yang mewajibkan beberapa jenis biaya untuk mendapatkan dan atau memenuhi kontrak untuk dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis mengacu kepada transfer barang dan jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 menggantikan sejumlah standar akuntansi pendapatan yang ada saat ini, termasuk PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Konstruksi dan ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun belum Berlaku Efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2020:

- **PSAK 73: Sewa**
PSAK 73 menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengukur seluruh sewa menggunakan model akuntansi tunggal yang sama dengan akuntansi sewa pembiayaan menurut PSAK 30. PSAK 73 memberikan dua pengecualian kepada penyewa terkait model akuntansi tersebut, yaitu untuk sewa dengan aset pendasar bernilai rendah dan sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Pada saat dimulainya masa sewa, penyewa akan mengakui kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. Penyewa juga secara terpisah akan mengakui beban bunga atas kewajiban sewa dan biaya penyusutan pada aset sewa.

Akuntansi untuk pesewa berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari akuntansi yang diatur dalam PSAK 30. Pesewa akan melanjutkan pengklasifikasian seluruh sewa berdasarkan prinsip klasifikasi sebagaimana yang saat ini diatur dalam PSAK 30.

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa dan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa.

- **Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**
Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- **Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif**
Amandemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
- **Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material**
Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Selain itu Amendemen ini juga memberikan panduan yang lebih jelas terkait definisi material dalam konteks mengurangi over disclosure karena perubahan ambang batas (thresholds) dari definisi material tersebut.
- **Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan dan Penyesuaian Tahunan 2019**
Amandemen ini membuka opsi yang memperkenankan entitas menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1. Selain itu amendemen ini juga melakukan penyesuaian kalimat pada paragraf 05 untuk menyelaraskannya dengan intensi dari IAS 1 Presentation of Financial Statements paragraf 05.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Standar baru atau amandemen berikut, dipertimbangkan tidak dapat diaplikasikan bagi Laporan Keuangan Konsolidasian Grup:

- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba, akan berlaku efektif 1 Januari 2020.
- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi, akan berlaku efektif 1 Januari 2022.

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interests*). Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas ditangan, kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- a. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu, dan
- b. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Penyertaan Jangka Panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional Cellum Global Zrt ("Cellum") adalah Forint Hungaria ("HUF") dan PT Cipta Sari Makmur ("CSM") adalah Dolar Amerika Serikat ("Dollar"). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai. Provisi penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen yang kemudian dibebankan pada saat pemakaian. Komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan vauzer prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan, dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset takberwujud (lanjutan)

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-25
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	4-8
Aset <i>Customer Premises Equipment</i> ("CPE")	4-5
Peralatan lainnya	2-5

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap (lanjutan)

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual.

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian mengandung sewa, Grup melakukan evaluasi terhadap substansi perjanjian. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi, bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Grup ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasikan untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditanggungkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditanggungkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International, Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd, dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd yang menggunakan Ringgit Malaysia.

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	14.125	14.130	14.375	14.385
Dolar Australia ("AU\$") 1	9.904	9.909	10.157	10.167
Euro 1	16.087	16.098	16.432	16.446
Yen Jepang 1	131,19	131,27	130,56	130,70
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.416	3.420	3.474	3.480

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Penjabaran valuta asing (lanjutan)

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2).

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan telepon selular

Pendapatan dari jasa pascabayar, yang terdiri dari pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan pulsa dan pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM dan vauker perdana) dan vauker isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vauker prabayar telah habis masa berlakunya.

ii. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Berdasarkan reviu atas informasi historis dan tren pelanggan, Perusahaan menentukan taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan adalah 23 tahun.

iii. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup (*transit*).

iv. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vi. Pendapatan lainnya

Pendapatan dari penjualan periferal atau perangkat telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa menara telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

vii. *Multiple-element arrangements*

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan di atas.

viii. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

ix. Program loyalitas pelanggan

Grup melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditanggungkan dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya.

x. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

t. Pajak penghasilan ("PPH")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak penghasilan (“PPH”) (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Mengacu pada revisi PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46.

PPH final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari “Beban lain-lain”.

u. Instrumen Keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Perusahaan termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan tidak lancar lainnya dan penyertaan tersedia untuk dijual.

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai (beban)/penghasilan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (piutang usaha jangka panjang dan kas yang dibatasi penggunaannya).

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif.

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b) investasi yang ditetapkan oleh Grup sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari reksadana, obligasi korporasi dan negara, dan modal saham yang dicatat sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" dan "Penyertaan Jangka Panjang" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale investment*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- a. situasi bisnis yang normal;
- b. peristiwa kegagalan; dan
- c. peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

Analisis nilai wajar instrumen keuangan dan rincian lebih lanjut mengenai penentuan nilai wajar diungkapkan dalam Catatan 35.

v. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("*loss event*") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara andal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, Grup terlebih dahulu menilai apakah penurunan nilai terjadi secara individual untuk aset keuangan yang secara individu memang signifikan, atau secara gabungan apabila aset keuangan tersebut secara individu tidak signifikan. Jika Grup tidak menemukan bukti yang objektif atas penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individu, terlepas apakah signifikan maupun tidak, aset keuangan tersebut dimasukkan dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tidak diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (diluar rugi kredit yang diperkirakan muncul di masa depan yang belum terjadi saat ini). Arus kas masa depan ini didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset berkurang melalui penggunaan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi atau grup investasi mengalami penurunan nilai. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

vi. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Grup diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui pada laporan laba rugi sebagai beban penerbitan sukuk.

Sukuk Ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

w. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahkan Modal Disetor".

x. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

y. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

z. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas; a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); b) hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

ab. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba rugi.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan dibawah ini.

i. Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 28 dan 29.

ii. Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan revaluasi atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 9.

iii. Provisi untuk penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi adanya bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

iv. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 25.

3. KAS DAN SETARA KAS

	30 Juni 2019		31 Desember 2018		
	Saldo		Saldo		
	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara rupiah	
Kas	Rp	-	71	-	36
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp	-	853	-	1.199
	US\$	12	165	10	139
	JPY	8	1	8	1
	EUR	1	21	1	20
	HKD	0	0	1	1
	AUD	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Rp	-	663	-	791
	US\$	12	175	2	28
	EUR	0	0	0	0
	SGD	0	0	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Rp	-	191	-	728
	US\$	8	107	2	31
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	Rp	-	54	-	342
Lain-lain	Rp	-	24	-	15
	US\$	-	-	0	0
Sub-jumlah			<u>2.254</u>		<u>3.295</u>
Pihak ketiga					
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	Rp	-	1	-	1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	15	213	12	181
	HKD	6	10	5	9
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	-	-	-	0
	US\$	12	176	10	148
	SGD	3	34	1	14
United Overseas Bank Limited ("UOB Singapore")	US\$	3	45	4	55
	SGD	2	23	1	14
	MYR	3	11	3	9
PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")	Rp	-	75	-	218
	US\$	-	-	2	30
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	Rp	-	38	-	17
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	Rp	-	176	-	197
	US\$	13	182	4	60
	MYR	4	15	3	12
	EUR	1	14	1	20
	AUD	1	12	0	2
	TWD	11	5	17	8
	MOP	0	1	0	0
	HKD	-	-	0	0
Sub-jumlah			<u>1.031</u>		<u>995</u>
Jumlah bank			<u>3.285</u>		<u>4.290</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Saldo		Saldo	
	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara rupiah
Deposito berjangka				
Pihak berelasi				
BNI	Rp	-	3.181	-
	US\$	20	285	58
BRI	Rp	-	2.419	-
	US\$	25	353	47
BTN	Rp	-	2.422	-
	US\$	-	-	31
Bank Mandiri	Rp	-	1.954	-
	US\$	5	71	16
Sub-jumlah			<u>10.685</u>	<u>9.910</u>
Pihak ketiga				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	1.255	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	300	-
	US\$	31	433	-
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	456	-
United Overseas Bank Limited ("UOB Singapore")	US\$	14	195	30
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	Rp	-	134	-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")	Rp	-	101	-
	US\$	-	-	25
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Rp	-	-	-
Lain-lain	Rp	-	101	-
	USD	3	42	-
	MYR	5	17	11
Sub-jumlah			<u>3.034</u>	<u>3.203</u>
Jumlah deposito berjangka			<u>13.719</u>	<u>13.113</u>
Jumlah			<u>17.075</u>	<u>17.439</u>

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Rupiah	4,25%-9,00%	2,50%-9,25%
Mata uang asing	0,50%-3,40%	0,50%-3,75%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	Mata uang	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara rupiah
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
Bank Mandiri	Rp	-	140	-	-
BRI	Rp	-	115	-	-
Lain-lain	Rp	-	51	-	1
Pihak ketiga					
SCB	US\$	8	113	8	116
Lain-lain	Rp	-	18	-	-
	US\$	5	71	6	88
	MYR	0	0	-	-
Jumlah deposito berjangka			<u>508</u>		<u>205</u>
Aset keuangan tersedia untuk dijual					
Pihak berelasi					
PT Mandiri Manajemen Investasi	Rp	-	380	-	379
Lainnya	Rp	-	74	-	91
Sub-jumlah			<u>454</u>		<u>470</u>
Jumlah aset keuangan tersedia untuk dijual			<u>454</u>		<u>470</u>
Rekening penampungan					
	Rp	-	58	-	136
	MYR	5	16	5	16
	US\$	0	0	0	1
Lainnya					
	Rp	-	1.024	-	476
	AUD	1	8	-	-
	MYR	0	0	-	-
Jumlah			<u>2.068</u>		<u>1.304</u>

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rupiah	4,00%-8,50%	5,00%
Mata uang asing	2,30%-6,50%	1,35%-1,92%

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pelanggan

(i) Pihak berelasi

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
BUMN	2.066	1.649
Indonusa	537	522
PT Indosat Tbk ("Indosat")	269	219
Lain-lain	526	467
Jumlah	3.398	2.857
Provisi penurunan nilai piutang	(711)	(731)
Jumlah bersih	2.687	2.126

(ii) Pihak ketiga

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Pelanggan individual dan bisnis	16.490	12.044
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	1.484	1.542
Jumlah	17.974	13.586
Provisi penurunan nilai piutang	(5.430)	(4.298)
Jumlah bersih	12.544	9.288

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Sampai dengan 3 bulan	2.142	1.748
3 sampai dengan 6 bulan	493	296
Lebih dari 6 bulan	763	813
Jumlah	3.398	2.857
Provisi penurunan nilai piutang	(711)	(731)
Jumlah bersih	2.687	2.126

(ii) Pihak ketiga

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Sampai dengan 3 bulan	10.852	8.006
3 sampai dengan 6 bulan	1.322	1.502
Lebih dari 6 bulan	5.800	4.078
Jumlah	17.974	13.586
Provisi penurunan nilai piutang	(5.430)	(4.298)
Jumlah bersih	12.544	9.288

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang
Belum jatuh tempo	10.063	511	7.512	394
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	2.931	326	2.244	281
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.815	525	1.797	329
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	6.563	4.779	4.890	4.025
Jumlah	21.372	6.141	16.443	5.029

Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp5.679 miliar dan Rp4.296 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat keterlambatan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Rupiah	3.389	2.850
Dolar A.S.	9	7
Lain-lain	0	0
Jumlah	3.398	2.857
Provisi penurunan nilai piutang	(711)	(731)
Jumlah bersih	2.687	2.126

(ii) Pihak ketiga

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Rupiah	15.455	11.348
Dolar A.S.	2.436	2.118
Dolar Australia	19	19
Lain-lain	64	101
Jumlah	17.974	13.586
Provisi penurunan nilai piutang	(5.430)	(4.298)
Jumlah bersih	12.544	9.288

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

c. Mutasi provisi penurunan nilai piutang

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	5.029	4.331
Provisi yang diakui selama periode berjalan (Catatan 24)	1.112	1.724
Penghapusbukuan piutang	-	(1.026)
Saldo akhir	<u>6.141</u>	<u>5.029</u>

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 30 Juni 2019, piutang usaha tertentu entitas anak sebesar Rp7.779 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15 dan 16c).

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PERSEDIAAN

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Komponen	421	429
Kartu SIM dan vaucer Prabayar	145	137
Lain-lain	253	218
Jumlah	<u>819</u>	<u>784</u>
Provisi atas persediaan usang		
Komponen	(20)	(38)
Kartu SIM dan vaucer Prabayar	(28)	(28)
Lain-lain	(1)	(1)
Jumlah	<u>(49)</u>	<u>(67)</u>
Jumlah bersih	<u>770</u>	<u>717</u>

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	67	53
Provisi yang diakui selama periode berjalan	-	22
Penghapusbukuan persediaan	(18)	(8)
Saldo akhir	<u>49</u>	<u>67</u>

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.177 miliar dan Rp1.497 miliar (Catatan 23).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Persediaan tertentu entitas anak sebesar Rp235 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 16c).

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, modul dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp119 miliar dan Rp125 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp176 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

7. ASET LANCAR LAINNYA

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Sewa dibayar di muka	2.592	1.382
Uang muka	2.127	1.803
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 33c.i)	1.980	3.636
Gaji dibayar di muka	538	200
Panjar kerja	96	30
Lain-lain	954	931
Jumlah	8.287	7.982

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

Grup memiliki penyertaan saham pada beberapa entitas sebagai berikut:

	30 Juni 2019						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Tiphone ^a	24,00	1.602	-	44	(11)	(7)	1.628
Indonusa ^b	20,00	210	-	-	-	-	210
Teltranet ^c	51,00	0	21	-	-	-	21
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^d	49,00	44	-	0	-	-	44
PT Graha Sakura Nusantara ("GSN") ^e	45,00	14	-	-	-	-	14
Cellum ^f	30,40	79	-	(5)	-	-	74
Jalin ^g	33,00	-	70	-	-	-	70
Lain-lain ^h	25,00-32,00	4	(1)	2	-	-	5
Sub-jumlah		1.953	90	41	(11)	(7)	2.066
Penyertaan jangka panjang lainnya		519	105	-	-	-	624
Jumlah penyertaan jangka panjang		2.472	195	41	(11)	(7)	2.690

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2019:

	Tiphone*	Indonusa**	Teltranet	ILCS	GSN	Cellum	Jalin	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>								
Aset lancar	7.749	449	313	132	15	8	78	180
Aset tidak lancar	742	310	117	41	168	38	187	599
Liabilitas jangka pendek	(1.557)	(572)	(192)	(84)	(4)	(21)	(36)	(669)
Liabilitas jangka panjang	(2.966)	(296)	(239)	-	(149)	(21)	(14)	(1.864)
Ekuitas (defisit)	3.968	(109)	(1)	89	30	4	215	(1.754)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>								
Pendapatan	6.616	824	111	72	-	9	91	66
Beban operasional	(6.449)	(583)	(126)	(73)	(1)	(25)	(66)	(216)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(84)	(39)	(9)	-	-	-	1	(24)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	83	202	(24)	(1)	(1)	(16)	26	(174)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(31)	(55)	4	-	-	-	(4)	-
Laba (rugi) periode berjalan	52	147	(20)	(1)	(1)	(16)	22	(174)
Laba (rugi) komprehensif lain	27	(3)	-	-	-	-	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	79	144	(20)	(1)	(1)	(16)	22	(174)

*Informasi keuangan tanggal 31 Maret 2019 dan periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

**Informasi keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

	31 Desember 2018							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:								
Tiphone ^a	24,00	1.539	-	87	(9)	(15)	-	1.602
Indonusa ^b	20,00	221	-	(11)	-	-	-	210
Teltranet ^c	51,00	18	-	(19)	-	1	-	0
ILCS ^d	49,00	43	-	1	-	0	-	44
GSN ^e	45,00	14	-	0	-	-	-	14
Cellum ^f	30,40	-	84	(5)	-	-	-	79
Lain-lain ^h	25,00-32,00	4	-	0	-	0	-	4
Sub-jumlah		1.839	84	53	(9)	(14)	-	1.953
Penyertaan jangka panjang lainnya		309	253	-	-	-	(43)	519
Jumlah penyertaan jangka panjang		2.148	337	53	(9)	(14)	(43)	2.472

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2018:

	Tiphone	Indonusa	Teltranet	ILCS	GSN	Cellum	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>							
Aset lancar	7.615	449	269	132	184	22	201
Aset tidak lancar	892	310	116	47	-	43	601
Liabilitas jangka pendek	(1.466)	(571)	(269)	(87)	154	(23)	(663)
Liabilitas jangka panjang	(3.062)	(297)	(138)	(2)	-	(20)	(1.863)
Ekuitas (defisit)	3.979	(109)	(22)	90	338	22	(1.724)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>							
Pendapatan	29.228	824	206	164	5	22	95
Beban operasional	(28.117)	(583)	(264)	(162)	(5)	(46)	(233)
Penghasilan (beban) lain-lain							
termasuk biaya pendanaan - bersih	(391)	(39)	(13)	1	1	(10)	(33)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	720	202	(71)	3	1	(34)	(171)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(137)	(55)	12	(1)	(0)	-	(1)
Laba (rugi) tahun berjalan	583	147	(59)	2	1	(34)	(172)
Laba (rugi) komprehensif lain	(63)	(3)	1	-	-	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	520	144	(58)	2	1	(34)	(172)

^a Tiphone berdiri pada 25 Juni 2008 dengan nama Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar.

Nilai wajar penyertaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.062 miliar dan Rp1.649 miliar. Nilai wajar dihitung dengan mengalikan jumlah lembar saham dengan harga pasar pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp605 dan Rp940 per lembar saham.

Rekonsiliasi informasi keuangan dan nilai tercatat penyertaan jangka panjang pada Tiphone pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Aset	8.507
Liabilitas	(4.528)
Aset bersih	3.979
Bagian grup atas aset bersih (24,00% tahun 2018)	955
Goodwill	647
Nilai tercatat penyertaan jangka panjang	<u>1.602</u>

^b Indonusa sebelumnya adalah entitas anak. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33% dan kepemilikan Perusahaan atas Indonusa menjadi 15,67%.

^c Investasi pada Teltranet dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian antara Metra dengan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd. pada tanggal 29 Agustus 2014. Teltranet bergerak dalam bidang jasa sistem komunikasi. Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet. Bagian kumulatif rugi atas investasi di Teltranet yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11 miliar.

^d ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.

^e Pada tanggal 31 Agustus 2017, NSI dan pihak ketiga mendirikan GSN yang menjalankan usaha *real estate* dan pemasaran perumahan dan apartemen.

^f Investasi pada Cellum dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian penyertaan saham baru bersyarat antara Metranet dengan Cellum Global Zrt pada tanggal 30 Januari 2018. Cellum adalah perusahaan penyedia solusi *mobile payment* dan *commerce services*.

^g Jalin sebelumnya adalah entitas anak. Pada tanggal 19 Juni 2019 perusahaan menjual 67% kepemilikan sahamnya (Catatan 1d).

^h Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp263 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

	1 Januari 2019	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	30 Juni 2019
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.626	14	10	-	(1)	1.649
Bangunan	11.833	15	110	(4)	180	12.134
Renovasi bangunan sewa	1.375	-	44	(42)	80	1.457
Peralatan sentral telepon	15.291	-	618	(10)	465	16.364
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.586	-	-	-	-	1.586
Peralatan dan instalasi transmisi	141.408	1.260	2.476	(2.476)	2.590	145.258
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	11.972	-	66	(9)	(96)	11.933
Jaringan kabel	45.451	-	2.528	-	1.506	49.485
Catu daya	17.864	5	495	(151)	567	18.780
Peralatan pengolahan data	14.265	7	376	(139)	760	15.269
Peralatan telekomunikasi lainnya	3.423	-	580	-	-	4.003
Peralatan kantor	2.142	14	76	(18)	9	2.223
Kendaraan	641	2	51	(111)	-	583
Peralatan lainnya	94	-	-	-	-	94
Aset dalam pembangunan	4.876	81	7.671	(19)	(9.204)	3.405
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.603	-	-	-	-	5.603
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	-	1
Kendaraan	578	2	-	-	-	580
Peralatan kantor	16	-	26	(4)	14	52
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	125	-	-	-	43	168
Aset PBH	252	-	-	(163)	-	89
Jumlah	<u>280.444</u>	<u>1.400</u>	<u>15.127</u>	<u>(3.146)</u>	<u>(3.087)</u>	<u>290.738</u>

	1 Januari 2019	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	30 Juni 2019
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	3.405	1	270	(4)	(7)	3.665
Renovasi bangunan sewa	949	-	98	(38)	-	1.009
Peralatan sentral telepon	10.550	-	716	(8)	23	11.281
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.320	-	260	-	-	1.580
Peralatan dan instalasi transmisi	74.247	253	5.665	(2.295)	(1.444)	76.426
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	5.005	-	402	(9)	-	5.398
Jaringan kabel	12.185	-	1.046	-	126	13.357
Catu daya	12.316	3	713	(144)	(9)	12.879
Peralatan pengolahan data	10.747	-	607	(61)	-	11.293
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.029	-	336	-	-	1.365
Peralatan kantor	1.312	1	180	(14)	1	1.480
Kendaraan	281	1	18	(110)	5	195
Peralatan lainnya	75	-	-	-	(3)	72
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	3.241	-	298	-	-	3.539
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	-	1
Kendaraan	126	-	36	-	41	203
Peralatan kantor	70	-	3	(3)	-	70
Aset CPE	20	-	-	-	-	20
Catu daya	73	-	-	-	-	73
Aset PBH	244	-	-	(155)	-	89
Jumlah	<u>137.196</u>	<u>259</u>	<u>10.648</u>	<u>(2.841)</u>	<u>(1.267)</u>	<u>143.995</u>
Nilai buku bersih	<u>143.248</u>					<u>146.743</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2018	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2018
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.519	46	39	-	22	1.626
Bangunan	9.802	43	67	(1)	1.922	11.833
Renovasi bangunan sewa	1.257	-	23	(24)	119	1.375
Peralatan sentral telepon	18.463	-	818	(1.920)	(2.070)	15.291
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.583	-	3	-	-	1.586
Peralatan dan instalasi transmisi	133.797	-	3.266	(6.398)	10.743	141.408
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	9.300	-	2.414	(3)	261	11.972
Jaringan kabel	47.155	-	5.887	(36)	(7.555)	45.451
Catu daya	16.279	13	484	(187)	1.275	17.864
Peralatan pengolahan data	13.294	23	140	(540)	1.348	14.265
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.659	-	1.765	-	(1)	3.423
Peralatan kantor	1.557	46	471	(18)	86	2.142
Kendaraan	439	6	203	(1)	(6)	641
Peralatan lainnya	97	-	18	-	(21)	94
Aset dalam pembangunan	4.415	2	17.821	(23)	(17.339)	4.876
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.582	-	21	-	-	5.603
Peralatan pengolahan data	83	-	-	(82)	-	1
Kendaraan	401	-	176	-	1	578
Peralatan kantor	80	-	4	(68)	-	16
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	215	-	-	(90)	-	125
Aset PBH	252	-	-	-	-	252
Jumlah	<u>267.251</u>	<u>179</u>	<u>33.620</u>	<u>(9.391)</u>	<u>(11.215)</u>	<u>280.444</u>

	1 Januari 2018	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2018
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	2.880	-	513	(1)	13	3.405
Renovasi bangunan sewa	823	-	150	(24)	-	949
Peralatan sentral telepon	14.553	-	1.307	(1.920)	(3.390)	10.550
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	802	-	518	-	-	1.320
Peralatan dan instalasi transmisi	69.240	-	10.958	(5.579)	(372)	74.247
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	4.334	-	677	(3)	(3)	5.005
Jaringan kabel	17.864	-	2.076	(36)	(7.719)	12.185
Catu daya	11.154	-	1.332	(177)	7	12.316
Peralatan pengolahan data	10.236	-	1.040	(519)	(10)	10.747
Peralatan telekomunikasi lainnya	602	-	428	-	(1)	1.029
Peralatan kantor	1.036	-	290	(18)	4	1.312
Kendaraan	226	-	62	(1)	(6)	281
Peralatan lainnya	96	-	4	-	(25)	75
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	2.638	-	603	-	-	3.241
Peralatan pengolahan data	76	-	7	(82)	-	1
Kendaraan	66	-	60	-	-	126
Peralatan kantor	80	-	44	(54)	-	70
Aset CPE	20	-	-	-	-	20
Catu daya	120	-	43	(90)	-	73
Aset PBH	234	-	10	-	-	244
Jumlah	<u>137.080</u>	<u>-</u>	<u>20.122</u>	<u>(8.504)</u>	<u>(11.502)</u>	<u>137.196</u>
Nilai buku bersih	<u>130.171</u>					<u>143.248</u>

a. Laba dari penjualan aset tetap

	2019	2018
Hasil penjualan aset tetap	564	250
Nilai buku bersih	(208)	(207)
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	<u>356</u>	<u>43</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

b. Penurunan nilai aset

Pada tahun 2014, Perusahaan telah memutuskan untuk menghentikan bisnis sambungan nirkabel tidak bergerak, dan telah melakukan percepatan pencatatan penyusutan aset bisnis sambungan nirkabel secara penuh di tahun 2015.

Pada tahun 2017, Perusahaan telah menghapusbukkan aset bisnis sambungan nirkabel yang telah disusutkan secara penuh dengan harga perolehan sebesar Rp3.193 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2018, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2018.

c. Lain-lain

(i) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp51 miliar dan Rp116 miliar masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 2,86%-4,9% dan 2,35%-2,69% masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018.

(ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(iii) Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp77 miliar dan Rp71 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tahun 2019 dan 2018, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp13 miliar dan Rp4 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(iv) Sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp26 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi, dan melakukan percepatan pencatatan penyusutan. Dampak penambahan beban penyusutan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp74 miliar.

Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan peralatan pengolahan data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp364 miliar dan akan meningkatkan laba sebelum pajak sebesar Rp274 miliar di akhir periode 31 Desember 2019 (6 bulan).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

- (iv) Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan peralatan pengolahan data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp637 miliar. Dampak perubahan umur manfaat ini atas laba sebelum pajak di masa yang akan datang, sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>Kenaikan (Penurunan)</u>
2020	266
2021	18
2022	(106)

- (v) Pertukaran aset tetap

Pada tahun 2019 dan 2018, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp788 miliar dan Rp777 miliar ditukarkan dengan peralatan Ericsson AB, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, dan PT ZTE Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2019, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih Rp996 miliar akan ditukarkan, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

- (vi) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan (“HGB”) berjangka waktu 10-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2053. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (vii) Pada tanggal 30 Juni 2019, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp135.198 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan sebesar Rp13.561 miliar, US38 juta, HKD8 juta, dan SGD205 juta dan MYR39 juta dan *first loss basis* sebesar Rp2.760 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.
- (viii) Pada tanggal 30 Juni 2019, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sekitar 32,11% dari nilai kontrak dengan perkiraan penyelesaian sampai dengan Mei 2020. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (ix) Seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 16b.i). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan sebesar Rp8.855 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15, 16c dan 16d).
- (x) Pada tanggal 30 Juni 2019, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp52.578 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (xi) Pada tahun 2018, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp33.557 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

- (xii) Telkomsel menandatangani perjanjian dengan perusahaan penyedia menara lainnya untuk penyewaan ruangan di menara telekomunikasi (slot) dan lokasi menara dengan jangka waktu selama 10 tahun. Telkomsel dapat memperpanjang periode sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disamping itu, Grup juga memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
2019	994	1.049
2020	474	945
2021	772	781
2022	595	605
2023	254	254
Selanjutnya	130	130
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	3.219	3.764
Bunga	(486)	(619)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	2.733	3.145
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)	(786)	(807)
Bagian jangka panjang (Catatan 16)	1.947	2.338

Rincian saldo kewajiban sewa guna usaha pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	981	1.089
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	829	930
PT Solusi Tunas Pratama	165	181
PT Putra Arga Binangun	142	159
PT Mandiri Utama Finance	130	186
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	87	103
PT Bali Towerindo Sentra	78	86
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	321	411
Jumlah	2.733	3.145

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 terdiri dari:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	2.660	2.662
Klaim restitusi pajak jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 25)	2.133	2.450
Izin penggunaan frekuensi - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	1.615	1.743
Pajak dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 25)	1.393	1.142
Beban tanggungan	594	474
Uang muka pembelian aset tetap	399	387
Obligasi konversi	215	213
Kas yang dibatasi penggunaannya	170	183
Setoran jaminan	164	173
Lain-lain	266	245
Jumlah	<u>9.609</u>	<u>9.672</u>

Sewa dibayar di muka merupakan pembayaran atas perjanjian sewa jaringan dan peralatan telekomunikasi serta sewa tanah dan bangunan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 40 tahun.

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

11. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2019	1.066	10.680	94	687	12.527
Penambahan	-	821	4	36	861
Akuisisi	415	-	-	36	451
Pengurangan	-	(39)	(7)	(15)	(61)
Reklasifikasi/penyesuaian	(46)	53	6	6	19
Saldo, 30 Juni 2019	<u>1.435</u>	<u>11.515</u>	<u>97</u>	<u>750</u>	<u>13.797</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2019	(29)	(6.896)	(81)	(489)	(7.495)
Beban amortisasi	-	(747)	(16)	(39)	(802)
Pengurangan	-	3	2	21	26
Reklasifikasi/translasi	(7)	(79)	5	25	(56)
Saldo, 30 Juni 2019	<u>(36)</u>	<u>(7.719)</u>	<u>(90)</u>	<u>(482)</u>	<u>(8.327)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.399</u>	<u>3.796</u>	<u>7</u>	<u>268</u>	<u>5.470</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2018	680	8.387	84	635	9.786
Penambahan	-	2.328	14	19	2.361
Akuisisi	422	1	2	-	425
Pengurangan	-	(51)	(11)	-	(62)
Reklasifikasi/translasi	(36)	15	5	33	17
Saldo, 31 Desember 2018	<u>1.066</u>	<u>10.680</u>	<u>94</u>	<u>687</u>	<u>12.527</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2018	(29)	(5.714)	(71)	(442)	(6.256)
Beban amortisasi	-	(1.226)	(9)	(49)	(1.284)
Pengurangan	-	51	4	-	55
Reklasifikasi/translasi	-	(7)	(5)	2	(10)
Saldo, 31 Desember 2018	<u>(29)</u>	<u>(6.896)</u>	<u>(81)</u>	<u>(489)</u>	<u>(7.495)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.037</u>	<u>3.784</u>	<u>13</u>	<u>198</u>	<u>5.032</u>

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* BDM (2012), Contact Centres Australia Pty.Ltd. (2014), MNDG (2015), Melon (2016), GSDm (2016), TSGN (2017), Nutech (2017), Swadharma (2018), CIP (2018), Telin Malaysia (2018), dan PST (2019) (Catatan 1d).
- (ii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak adalah 1-6 tahun.
- (iii) Pada tanggal 30 Juni 2019, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah sebesar Rp4.682 miliar.

12. UTANG USAHA

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	831	804
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	147	189
Sub-jumlah	<u>978</u>	<u>993</u>
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	11.950	10.874
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.188	1.471
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	1.531	1.428
Sub-jumlah	<u>14.669</u>	<u>13.773</u>
Jumlah	<u>15.647</u>	<u>14.766</u>

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rupiah	13.406	11.726
Dolar A.S.	2.182	2.978
Lain-lain	59	62
Jumlah	<u>15.647</u>	<u>14.766</u>

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi Umum, administrasi dan pemasaran	8.997	8.013
Gaji dan tunjangan	2.206	2.299
Beban bunga dan administrasi bank	1.592	2.219
	300	238
Jumlah	<u>13.095</u>	<u>12.769</u>

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

a. Pendapatan diterima di muka jangka pendek

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kartu pulsa Prabayar	4.150	4.374
Sewa menara telekomunikasi	802	356
Jasa telekomunikasi lainnya	333	284
Lain-lain	231	176
Jumlah	<u>5.516</u>	<u>5.190</u>

b. Pendapatan diterima di muka jangka panjang

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan	309	258
Jasa telekomunikasi lainnya	458	394
Jumlah	<u>767</u>	<u>652</u>

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	<u>30 Juni 2019</u>		<u>31 Desember 2018</u>	
		<u>Saldo terutang</u>		<u>Saldo terutang</u>	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	1.397	-	956
Sub-jumlah			<u>1.397</u>		<u>956</u>
Pihak ketiga					
HSBC	Rp	-	925	-	317
	US\$	0	4	0	4
DBS	Rp	-	727	-	699
	US\$	1	12	1	13
MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")	Rp	-	720	-	1.295
UOB	Rp	-	410	-	580
BCA	Rp	-	125	-	-
SCB	Rp	-	100	-	100
Bank CIMB Niaga	Rp	-	78	-	78
Lain-lain	Rp	-	19	-	1
Sub-jumlah			<u>3.120</u>		<u>3.087</u>
Jumlah			<u>4.517</u>		<u>4.043</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
BNI							
2014 - 2019	Metranet, Sigma ^a , GSD ^e	Rp	525	10 Juli 2019 - 18 Februari 2020	Bulanan	9,00% - 9,50%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
2013 - 2019	Telkom Infratel, Infomedia ^f , Sigma ^e , MD Media	Rp	3.226	25 Juli 2019 - 31 Januari 2020	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,20% - 3,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
HSBC							
2018	Metra, MD Media, PINS	Rp	650	2 Juli 2019 - 17 September 2019	Bulanan, Triwulanan	1 bulan JIBOR + 0,60% - 0,70%	Tidak ada
2018	Sigma	US\$	0,004	15 Juli 2019	Bulanan	3 bulan JIBOR + 1,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
2018	Sigma	Rp	600	15 Juli 2019	Bulanan	13,12%	Piutang usaha (Catatan 5)
DBS							
2018	Telkom Infratel, Infomedia	Rp	600	26 Agustus 2019 - 29 Februari 2020	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
2016	Nutech ^e	Rp	17	13 Oktober 2019	Bulanan	10,50% - 11,00%	Tidak ada
2016	Sigma ^{b,c}	US\$	0,02	31 Juli 2019	Semesteran	3,25% (US\$), 10,75% (Rp)	Piutang usaha (Catatan 5)
MUFG Bank							
2018	Infomedia, Metra	Rp	750	9 September 2019 - 27 September 2019	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70% - 0,95%	Tidak ada
UOB							
2016 - 2018	MD Media, Finnet ^d	Rp	800	23 Juli 2019 - 20 Desember 2020	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
BCA							
2019	Telkom Infratel	Rp	125	30 September 2019 - 22 Mei 2020	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
SCB							
2015	GSD ^e	Rp	100	26 September 2019	Bulanan	10,50%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga							
2013	GSD ^e	Rp	85	18 Oktober 2019	Bulanan	10,90% - 11,50%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)

* Disajikan dalam mata uang asal.

^a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 21 Desember 2017.

^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2018.

^c Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah.

^d Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Juni 2018.

^e Perpanjangan otomatis bila belum dilunasi.

^f Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan, Telkom Infratel dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit modal kerja dari DBS sebesar Rp600 miliar. Per 30 Juni 2019, Fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp125 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Perusahaan, TII, Infomedia dan Metra menandatangani perjanjian kredit modal kerja dari MUFG Bank sebesar Rp500 miliar. Per 30 Juni 2019, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp80 miliar.

Pada tanggal 8 April 2019, Perusahaan, Metra, MD Media dan Metranet menandatangani perjanjian kredit modal kerja dari HSBC sebesar Rp1.000 miliar. Per 30 Juni 2019, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp915 miliar.

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	198	198
Obligasi dan wesel bayar	16b	526	525
Utang bank	16c	5.458	4.472
Pinjaman lainnya	16d	402	294
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	786	807
Jumlah		<u>7.370</u>	<u>6.296</u>

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	652	751
Obligasi dan wesel bayar	16b	9.957	9.956
Utang bank	16c	29.521	18.753
Pinjaman lainnya	16d	3.539	1.950
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	1.947	2.338
Jumlah		<u>45.616</u>	<u>33.748</u>

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Tahun</u>				<u>Selanjutnya</u>
			<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	652	99	181	144	127	101
Obligasi dan wesel bayar	16b	9.957	2.490	477	2.198	-	4.792
Utang bank	16c	29.521	2.360	8.029	3.547	11.579	4.006
Pinjaman lainnya	16d	3.539	426	852	852	863	546
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	1.947	395	662	539	233	118
Jumlah		<u>45.616</u>	<u>5.770</u>	<u>10.201</u>	<u>7.280</u>	<u>12.802</u>	<u>9.563</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata uang	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	4.223	555	4.607	602
	US\$	11	153	13	188
	Rp	-	142	-	159
Jumlah			850		949
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)			(198)		(198)
Bagian jangka panjang			652		751

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	US\$	Semesteran	Semesteran	3,85%
	Rp	Semesteran	Semesteran	7,50%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar

<u>Obligasi dan wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>30 Juni 2019</u>		<u>31 Desember 2018</u>	
		<u>Saldo terutang</u>		<u>Saldo terutang</u>	
		<u>Mata uang asal</u>	<u>Setara</u>	<u>Mata uang asal</u>	<u>Setara</u>
		<u>(dalam jutaan)</u>	<u>Rupiah</u>	<u>(dalam jutaan)</u>	<u>Rupiah</u>
Obligasi					
2010					
Seri B	Rp	-	1.995	-	1.995
2015					
Seri A	Rp	-	2.200	-	2.200
Seri B	Rp	-	2.100	-	2.100
Seri C	Rp	-	1.200	-	1.200
Seri D	Rp	-	1.500	-	1.500
Wesel bayar jangka menengah (<i>Medium term notes</i> atau "MTN")					
MTN I Telkom Tahun 2018					
Seri A	Rp	-	262	-	262
Seri B	Rp	-	200	-	200
Seri C	Rp	-	296	-	296
MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018					
Seri A	Rp	-	264	-	264
Seri B	Rp	-	296	-	296
Seri C	Rp	-	182	-	182
Jumlah			10.495		10.495
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(12)		(14)
Jumlah			10.483		10.481
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15b)			(526)		(525)
Bagian jangka panjang			9.957		9.956

i. Obligasi

Tahun 2010

<u>Obligasi</u>	<u>Pokok</u>	<u>Penerbit</u>	<u>Tempat</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jatuh</u>	<u>Periode</u>	<u>Tingkat bunga</u>
	<u>utang</u>		<u>pencatatan</u>	<u>terbit</u>	<u>tempo</u>	<u>pembayaran bunga</u>	<u>per tahun</u>
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Sekuritas ("Bahana"), PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank CIMB Niaga. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi pada tanggal 26 September 2018, wali amanat obligasi berganti menjadi BTN.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan sistem satelit) dan optimasi *legacy* dan fasilitas penunjang (*fixed wireline* dan *wireless*).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Tahun 2010 (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2019, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwalianamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Tahun 2015

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *Broadband, Backbone, Metro & RMJ* serta *IT App & Support* dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 30 Juni 2019, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwalianamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Wesel bayar

MTN I Telkom Tahun 2018

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
Seri A	Rp	262	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	7,25%	Seluruh aset
Seri B	Rp	200	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	8,00%	Seluruh aset
Seri C	Rp	296	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	8,35%	Seluruh aset
		<u>758</u>					

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* (MTN) I Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 24 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan akan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp758 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. MTN sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). MTN tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*.

Pada tanggal 30 Juni 2019, peringkat MTN yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (Triple A).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1
3. *Debt Service Coverage* minimal sebesar 125%

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode imbalan</u>	<u>Cicilan imbalan per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
Seri A	Rp	264	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	19	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri B	Rp	296	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	24	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri C	Rp	182	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	15	Hak manfaat obyek Ijarah
		<u>742</u>				<u>58</u>	

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018 (lanjutan)

ii. Wesel bayar (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* (MTN) Syariah Ijarah Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 26 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan akan menerbitkan MTN Syariah Ijarah dengan keseluruhan nilai pokok MTN Syariah Ijarah yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp742 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). MTN Syariah Ijarah tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN Syariah Ijarah tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*. Objek Ijarah dari MTN Syariah Ijarah tersebut berupa jaringan telekomunikasi di wilayah D.I Yogyakarta yaitu jaringan kabel, peralatan teknologi informasi, dan alat-alat produksi layanan telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 30 Juni 2019, peringkat MTN Syariah Ijarah yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA Sy (Triple A Syariah).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1
3. *Debt Service Coverage* minimal sebesar 125%

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	7.544	-	6.826
BRI	Rp	-	1.858	-	1.248
Bank Mandiri	Rp	-	10.652	-	4.546
Sub-jumlah			<u>20.054</u>		<u>12.620</u>
Pihak ketiga					
MUFG Bank	Rp	-	4.765	-	3.011
	US\$	9	126	10	144
Bank Sindikasi	Rp	-	1.500	-	1.750
	US\$	37	523	37	532
Citibank	Rp	-	750	-	1.000
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Rp	-	1.812	-	740
UOB Singapore	US\$	44	625	49	710
PT Bank BTPN ("BTPN")*	Rp	-	644	-	661
Bank CIMB Niaga	Rp	-	409	-	462
ANZ	Rp	-	440	-	440
UOB	Rp	-	393	-	428
DBS	Rp	-	699	-	379
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	Rp	-	181	-	204
Exim Bank of Malaysia Berhad	MYR	16	54	23	81
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	US\$	-	-	3	45
HSBC	Rp	-	1.000	-	-
Bank of China	Rp	-	1.000	-	-
Lain-lain	Rp	-	28	-	33
	MYR	12	41	13	46
Sub-jumlah			<u>14.990</u>		<u>10.666</u>
Jumlah			<u>35.044</u>		<u>23.286</u>
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			<u>(65)</u>		<u>(61)</u>
			<u>34.979</u>		<u>23.225</u>
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15b)			<u>(5.458)</u>		<u>(4.472)</u>
Bagian jangka panjang			<u>29.521</u>		<u>18.753</u>

*Dahulu Sumitomo, penggabungan usaha BTPN dan Sumitomo berlaku efektif 1 Februari 2019.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
BNI								
2018 - 2019	GSD, Perusahaan	Rp	2.342	17	2018 - 2021	Bulanan, Kuartalan	8,75%, 9,00%	Piutang usaha (Catatan 5), seluruh aset
2013 - 2018	Perusahaan, Telkomsel ^a , GSD, TLT, Sigma, Dayamitra, Telkom Infratel, Telkom Akses, Metra	Rp	12.606	1.779	2016 - 2033	Bulanan, Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,70% - 2,50%; 1 bulan JIBOR + 2,20% - 3,00%	Piutang usaha (Catatan 5), persediaan (Catatan 6) dan aset tetap (Catatan 9)
Bank Mandiri								
2016 - 2018	Perusahaan, Telkomsel ^{a,b} , Balebat, Telkomsat	Rp	8.750	20	2017 - 2024	Bulanan, Kuartalan	8,50%, 8,75%, 9,00%, 9,50%	Piutang usaha (Catatan 5), persediaan (Catatan 6) dan aset tetap (Catatan 9)
2017 - 2019	GSD, TII, Dayamitra, Telkomsel, Perusahaan	Rp	3.620	-	2019 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,85%	Tidak ada
BRI								
2019	Perusahaan	Rp	2.000	-	2021 - 2026	Kuartalan	9,00%	Seluruh aset
2017 - 2019	Perusahaan, Dayamitra, GSD	Rp	1.253	95	2019 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,85% - 2,70%	Aset tetap (Catatan 9)
MUFG Bank								
2015 - 2018	GSD, Metra, Infomedia, Dayamitra, Telkomsel	Rp	5.200	196	2016 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,43% - 2,25%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
2018	TII	US\$	0,01	0,001	2019 - 2022	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
Bank Sindikasi								
2015	Perusahaan, GSD	Rp	3.000	250	2016 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00%	Seluruh aset
2018	TII	US\$	0,09	-	2019 - 2024	Kuartalan	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
Citibank								
2018	Perusahaan	Rp	1.000	-	2019 - 2020	Kuartalan	8,50%	Tidak ada
BCA								
2018	PST	Rp	740	75	2018 - 2024	Bulanan	10,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
2017 - 2018	Metra, Dayamitra, Telkom Infratel	Rp	870	21	2018 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,85%	Aset tetap (Catatan 9)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
UOB Singapore 2016	TII	US\$	0,06	-	2019 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
BTPN 2015 - 2019	GSD, Metra, Infomedia, Dayamitra, TII	Rp	1.309	107	2016 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,44% - 2,15%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga 2011	GSD	Rp	78	4	2011 - 2021	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
2017	GSD, Metra	Rp	495	48	2018 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
ANZ 2015 - 2017	GSD, PINS	Rp	750	-	2020 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00%	Tidak ada
UOB 2016	Dayamitra	Rp	500	36	2018 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,20%	Aset tetap (Catatan 9)
DBS 2016 - 2017	Nutech, Telkomsat	Rp	136	17	2017 - 2022	Bulanan, Kuartalan	11,00%, 9,18%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
2017 - 2019	PINS, Dayamitra	Rp	775	38	2018 - 2026	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
ICBC 2017	GSD	Rp	272	23	2017 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,36%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
Exim Bank of Malaysia Berhard 2016	TSGN	MYR	0,06	0,007	2017 - 2020	Bulanan	ECOF + 1,89%	Tidak ada
HSBC 2019	Telkomsel	Rp	1.000	-	2019 - 2021	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 0,60%	Tidak ada
Bank of China 2018 - 2019	Telkomsel	Rp	1.000	-	2019 - 2021	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 0,60%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal

^a Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 30 Juni 2019, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 Desember 2018.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 30 Juni 2019, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 30 Juni 2019, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan, GSD, Metra dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit dari BTPN, MUFG Bank, ANZ, dan sindikasi bank (BCA dan BNI) masing-masing sebesar Rp750 miliar, Rp750 miliar, Rp500 miliar dan Rp3.000 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 2 Agustus 2016, Dayamitra dan Telkom Akses dimasukkan sebagai peminjam ke BTPN dan MUFG Bank, perjanjian fasilitas kredit dan mengecualikan GSD dari perjanjian tersebut. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 13 Maret 2017, PINS dimasukkan sebagai salah satu peminjam dalam perjanjian fasilitas kredit ANZ. Pada tahun 2017, PINS melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp200 miliar. Per 30 Juni 2019, fasilitas yang belum digunakan dari BTPN, MUFG Bank, dan ANZ masing-masing sebesar Rp82,5 miliar, Rp82,5 miliar dan Rp60 miliar.

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan, Dayamitra, Sigma, GSD, dan TII menandatangani perjanjian kredit dari BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp2.005 miliar, dan Rp1.500 miliar. Per 30 Juni 2019, fasilitas yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp5 miliar.

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan, GSD, Metra, Dayamitra, PINS, dan Telkomsat menandatangani perjanjian kredit dari MUFG Bank, BTPN, DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA, masing-masing sebesar Rp400 miliar, Rp400 miliar, Rp850 miliar, Rp495 miliar, dan Rp850 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 29 Juni 2017, BCA setuju Telkom Infratel menggantikan PINS selaku debitur yang dapat melakukan penarikan kredit. Per 30 Juni 2019, fasilitas yang belum digunakan dari MUFG Bank, BTPN, DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA masing-masing sebesar Rp79 miliar, Rp79 miliar, Rp420 miliar, Rp20 miliar, dan Rp564 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Perusahaan, Dayamitra dan TII menandatangani perjanjian kredit dari BNI, BRI, Bank Mandiri, MUFG Bank dan BTPN, masing-masing sebesar Rp825 miliar, Rp200 miliar, Rp775 miliar, Rp800 miliar dan Rp628 miliar. Per 30 Juni 2019, fasilitas yang belum digunakan dari BTPN adalah sebesar Rp538 miliar.

Pada tanggal 19 Juni 2019, Perusahaan dan Dayamitra menandatangani perjanjian dengan BNI masing-masing sebesar Rp2.160 miliar dan Rp840 miliar. Per 30 Juni 2019, fasilitas yang belum digunakan dari BNI sebesar Rp2.800 miliar.

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BRI sebesar Rp2.000 miliar. Per 30 Juni 2019, fasilitas yang belum digunakan BRI adalah sebesar Rp1.300 miliar.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

d. Pinjaman lainnya

Kreditur	Mata uang	Saldo terutang	
		30 Juni 2019	31 Desember 2018
SMI			
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	Rp	3.950	2.250
Jumlah		(9)	(6)
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15b)		3.941	2.244
Bagian jangka panjang		(402)	(294)
		3.539	1.950

i. Dayamitra

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
SMI							
12 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	700	50	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR+1,85%	Aset tetap (Catatan 9)
29 Maret 2017	Dayamitra	Rp	600	43	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR+1,85%	Aset tetap (Catatan 9)

Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 5:1.
2. *EBITDA* terhadap biaya bunga tidak lebih dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Dayamitra memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

ii. Perusahaan

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
SMI							
14 November 2018	Perusahaan	Rp	1.000	-	Semesteran (2019-2023)	8,35%	Tidak ada
29 Maret 2019	Perusahaan	Rp	2.273	-	Kuartalan (2020-2024)	8,49%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap biaya bunga tidak kurang dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal 125%.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

d. Pinjaman lainnya (lanjutan)

iii. Telkomsat

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata Uang</u>	<u>Total fasilitas (dalam miliar)*</u>	<u>Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*</u>	<u>Jadwal pembayaran</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
SMI							
29 Maret 2019	Telkomsat	Rp	164	-	Semesteran (2020-2024)	8,49%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap biaya bunga tidak kurang dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal 125%.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Perusahaan, Telkomsat, dan Telkom infratel menandatangani perjanjian kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") masing-masing sebesar Rp2.273 miliar, Rp164 miliar, dan Rp563 miliar. Per 30 Juni 2019, fasilitas yang belum digunakan dari SMI sebesar Rp1.206 miliar.

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	13.844	17.899
GSD	256	212
Metra	149	171
TII	110	111
Dayamitra	37	-
Jumlah	14.396	18.393
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) periode berjalan entitas anak:		
Telkomsel	4.434	4.103
Metra	4	2
TII	(3)	2
GSD	(15)	2
Dayamitra	0	-
Jumlah	4.420	4.109

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dibawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Aset lancar	17.022	16.836
Aset tidak lancar	64.300	65.814
Liabilitas jangka pendek	(22.208)	(20.737)
Liabilitas jangka panjang	(19.556)	(10.767)
Jumlah ekuitas	39.558	51.146
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	25.714	33.247
Kepentingan nonpengendali	13.844	17.899

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan	45.121	42.742
Beban operasi	(28.005)	(27.192)
Pendapatan lain-lain - bersih	(88)	49
Laba sebelum pajak penghasilan	17.028	15.599
Beban pajak penghasilan - bersih	(4.358)	(3.877)
Laba periode berjalan dari operasi yang masih berlanjut	12.670	11.722
Penghasilan komprehensif lain - bersih	-	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	12.670	11.722
Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	4.434	4.103
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	8.490	10.105

Ringkasan laporan arus kas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kegiatan operasi	21.879	18.183
Kegiatan investasi	(6.547)	(7.342)
Kegiatan pendanaan	(15.557)	(12.237)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(225)	(1.396)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM

Keterangan	30 Juni 2019		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.976.270.580	5,02	249
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Harry Mozarta Zen	474.692	0	0
Faizal R. Djoemadi	126.800	0	0
Bogi Witjaksono	55.000	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Siti Choiriana	540	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	42.481.745.973	42,89	2.124
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

Keterangan	31 Desember 2018		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.560	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.944.921.880	4,99	247
Komisaris (Catatan 1b):			
Hendri Saparini	654.505	0	0
Rinaldi Firmansyah	454.113	0	0
Direksi (Catatan 1b):			
Alex Janangkih Sinaga	1.683.359	0	0
Herdy Rosadi Harman	1.514.720	0	0
Abdus Somad Arief	1.515.022	0	0
Dian Rachmawan	1.575.562	0	0
Harry Mozarta Zen	689.492	0	0
David Bangun	1.000	0	0
Siti Choiriana	540	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	42.506.852.846	42,92	2.126
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446	1.446
Selisih lebih harga penjualan kembali 211.290.500 saham yang diperoleh kembali pada tahap I atas biaya perolehannya	544	544
Selisih lebih harga penjualan kembali 215.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap II atas biaya perolehannya	576	576
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	478	478
Selisih lebih harga pengalihan saham yang diperoleh kembali untuk program kepemilikan saham karyawan atas biaya perolehannya	228	228
Selisih lebih harga penjualan kembali 22.363.000 sisa saham yang diperoleh kembali pada tahap III atas biaya perolehannya	36	36
Selisih lebih harga penjualan kembali 864.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap IV atas biaya perolehannya	1.996	1.996
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373)	(373)
Pengurangan tambahan modal disetor sebagai akibat penarikan modal saham yang diperoleh kembali	(2.454)	(2.454)
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	(22)	(22)
Selisih atas divestasi anak perusahaan	239	-
Jumlah bersih	2.694	2.455

Saldo selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendalian berjumlah Rp478 miliar berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri, dimana Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp537 miliar.

20. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	627	673
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	52	48
Selisih transaksi akuisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(637)	(637)
Komponen ekuitas lainnya	37	37
Jumlah	465	507

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PENDAPATAN

	2019	2018
Pendapatan telepon		
Telepon bergerak	12.872	15.573
Telepon tidak bergerak	2.645	3.118
Jumlah pendapatan telepon	15.517	18.691
Pendapatan interkoneksi	3.300	2.363
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika		
Internet dan data selular	26.885	20.197
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	12.168	11.414
<i>Short Messaging Services</i> ("SMS")	3.701	4.868
TV berbayar	1.015	831
Lain-lain	460	300
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	44.229	37.610
Pendapatan jaringan	938	654
Pendapatan lainnya		
CPE dan terminal	1.210	978
Penjualan periferal	865	963
Sewa menara telekomunikasi	569	432
<i>Call center service</i>	363	249
<i>E-health</i>	252	263
<i>E-payment</i>	291	217
Lain-lain	1.811	1.948
Jumlah pendapatan lainnya	5.361	5.050
Jumlah pendapatan	69.345	64.368

Rincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Grup dari transaksi keagenan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Pendapatan bruto	28.004	20.725
Kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah	(1.119)	(528)
Pendapatan neto	26.885	20.197

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

22. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Gaji dan tunjangan	4.135	4.505
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	1.602	1.378
Beban pensiun, manfaat karyawan dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 28)	626	810
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 29)	76	70
Lain-lain	49	272
Jumlah	6.488	7.035

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Operasi dan pemeliharaan	12.773	11.654
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 33c.i)	2.836	2.716
Sewa sirkit dan CPE	2.454	3.628
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.184	1.090
Beban pokok penjualan <i>handset</i> (Catatan 6)	865	1.074
Listrik, gas, dan air	535	495
Beban pokok penjualan kartu SIM dan vauker (Catatan 6)	312	423
Sewa menara	237	231
Lain-lain	594	572
Jumlah	<u>21.790</u>	<u>21.883</u>

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Provisi penurunan nilai piutang (Catatan 5d)	1.112	1.188
Beban umum	949	1.051
Jasa profesional	272	225
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	206	228
Perjalanan	185	207
Rapat	128	120
Sumbangan sosial	99	55
Beban penagihan	93	58
Lain-lain	170	162
Jumlah	<u>3.214</u>	<u>3.294</u>

Lihat Catatan 30 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

25. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan		
PPh Badan	494	494
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	1.063	1.119
Entitas anak		
PPh Badan	179	406
PPN	1.195	1.027
Jumlah tagihan restitusi pajak	2.931	3.046
Bagian jangka pendek	(798)	(596)
Bagian jangka panjang (Catatan 10)	<u>2.133</u>	<u>2.450</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak dibayar di muka

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan:		
PPh		
PPh 23 - Penyerahan jasa	-	63
PPN	1.274	1.048
Entitas anak:		
PPh Badan	-	14
PPh		
PPh 22 - Pembelian barang	1	-
PPh 23 - Penyerahan jasa	317	1
PPh 25 - Angsuran PPh Badan	143	-
PPN	2.093	2.765
Jumlah pajak dibayar di muka	<u>3.828</u>	<u>3.891</u>
Bagian jangka pendek	<u>(2.435)</u>	<u>(2.749)</u>
Bagian jangka panjang (Catatan 10)	<u>1.393</u>	<u>1.142</u>

c. Utang pajak

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	30	18
Pasal 21 - PPh pribadi	146	47
Pasal 22 - Pembelian barang	2	3
Pasal 23 - Penyerahan jasa	165	36
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	6	1
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	1.012	3
Pasal 29 - PPh Badan	475	-
PPN WAPU	230	334
	<u>2.066</u>	<u>442</u>
Entitas anak:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	63	75
Pasal 21 - PPh pribadi	95	113
Pasal 22 - Pembelian barang	1	5
Pasal 23 - Penyerahan jasa	87	110
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	710	14
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	3	7
Pasal 29 - PPh Badan	1.177	389
PPN	585	25
	<u>2.721</u>	<u>738</u>
Jumlah utang pajak	<u>4.787</u>	<u>1.180</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kini		
Perusahaan	716	41
Entitas anak	4.642	4.392
	<u>5.358</u>	<u>4.433</u>
Tanggungan		
Perusahaan	10	134
Entitas anak	(28)	(185)
	<u>(18)</u>	<u>(51)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>5.340</u>	<u>4.382</u>

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 20% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	20.838	17.189
Dikurangi pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih	(1.443)	(628)
	<u>19.395</u>	<u>16.561</u>
Pajak dihitung pada tarif Perusahaan 20%	3.879	3.312
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	828	810
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	341	252
Pajak penghasilan final	48	46
Pembalikan aset pajak tanggungan	-	(118)
Lain-lain	244	80
Beban pajak penghasilan bersih	<u>5.340</u>	<u>4.382</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	20.838	17.189
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	12.555	11.090
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	33.393	28.279
Dikurangi: laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(21.493)	(19.360)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	11.900	8.919
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(320)	(285)
	<u>11.580</u>	<u>8.634</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2019	2018
Perbedaan temporer:		
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan penghapusbukuan piutang	781	505
Pendapatan instalasi tanggihan	77	50
Penyisihan lain-lain	151	(58)
Penyisihan beban karyawan	(271)	(896)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(150)	96
Penyusutan dan laba atas penjualan aset tetap	(110)	30
Sewa pembiayaan	(8)	(6)
Jumlah perbedaan temporer bersih	470	(279)
Perbedaan tetap:		
Sumbangan	107	68
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	101	177
Imbalan karyawan	95	125
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(8.723)	(8.261)
Lain-lain	(281)	124
Jumlah perbedaan tetap bersih	(8.701)	(7.767)
Kompensasi rugi fiskal	-	(588)
Laba (rugi) kena pajak	3.349	-
Beban pajak kini	670	-
Beban pajak final	46	41
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	716	41
Beban pajak kini - entitas anak	4.642	4.392
Jumlah beban pajak penghasilan kini	5.358	4.433

Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 menerapkan peraturan dibawah Peraturan Pemerintah ("PP") No. 56/2015 mengenai pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, maka Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 5% dalam perhitungan beban dan liabilitas pajak penghasilan badan Perusahaan.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 20% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 2018.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

Pada tanggal 15 November 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk PPN masa pajak Januari sampai dengan September dan November 2007 senilai Rp142 miliar. Pada tanggal 20 Januari 2014, Perusahaan mengajukan keberatan dan di bulan Desember 2014, Otoritas Pajak menerbitkan keputusan penolakan keberatan. Perusahaan menerima hasil pemeriksaan kurang bayar PPN senilai Rp22 miliar (termasuk denda Rp10 miliar) dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN Interkoneksi senilai Rp120 miliar (termasuk denda Rp39 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak dan pada tanggal 12 Maret 2015, Perusahaan telah mengajukan banding.

Pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas proses banding PPN Interkoneksi tersebut, dimana dalam putusannya dinyatakan bahwa Interkoneksi *International Incoming Call* adalah penyerahan jasa kena pajak di luar daerah pabean sehingga masuk kategori ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan. Pada bulan September 2017, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp115 miliar dan saldo tersisa senilai Rp5 miliar telah dikompensasikan sebagai pembayaran Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk PPh 21 dan SKPKB untuk PPN WAPU dan PPN Jasa Luar Negeri.

Pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 23 November 2017, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali. Sebagai tanggapan atas putusan memori peninjauan kembali, pada tanggal 23 November 2017 dan 21 Desember 2017, Perusahaan telah mengirimkan kontra memori peninjauan kembali atas perkara PPN Interkoneksi ini. Pada bulan September dan November 2018, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung atas sengketa pajak masa Juni s.d. Agustus dan November 2007 dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali Otoritas Pajak dan memperkuat putusan pengadilan pajak. Pada bulan Januari, Februari dan Maret 2019, Perusahaan menerima keputusan dari Mahkamah Agung sebagai hasil dari pemeriksaan pajak untuk masa pajak Januari s.d. April dan September 2007. Berdasarkan keputusan, Mahkamah Agung menolak banding Otoritas Pajak dan menguatkan keputusan Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, peninjauan kembali untuk masa pajak Mei 2007 masih dalam proses.

Pada bulan November 2014, Perusahaan menerima SKPKB dari Otoritas Pajak untuk tahun fiskal 2011. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan menerima ketetapan kurang bayar PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 senilai Rp182,5 miliar (termasuk denda Rp60 miliar) dan ketetapan kurang bayar pajak penghasilan badan senilai Rp2,8 miliar (termasuk denda Rp929 juta). Bagian yang telah diterima senilai Rp4,7 miliar (termasuk denda sebesar Rp2 miliar) telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN Interkoneksi senilai Rp178 miliar (termasuk denda Rp58 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak dan pada tanggal 7 Januari 2015, Perusahaan telah mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2015, Otoritas Pajak telah menerbitkan putusan penolakan keberatan. Sebagai tanggapan atas putusan keberatan tersebut, pada tanggal 20 Januari 2016, Perusahaan mengajukan banding.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 4 dan 5 April 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas banding tersebut, dan dalam putusannya, dinyatakan bahwa Interkoneksi *International Incoming Call* adalah penyerahan jasa kena pajak di luar daerah pabean sehingga termasuk sebagai kategori ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Sedangkan untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011 tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi ketentuan formal, untuk itu pada tanggal 19 dan 21 Juni 2017, Perusahaan mengajukan memori peninjauan kembali. Pada tanggal 15 Oktober 2018, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Pada tanggal 13 November 2018, Perusahaan mengirimkan kontra memori peninjauan kembali untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011 kepada Mahkamah Agung. Pada bulan November 2018, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan kontra memori peninjauan kembali untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011. Sampai dengan bulan Juni 2019, Perusahaan telah menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Perusahaan atas masa pajak Februari, Maret, Mei dan Juni 2011, serta menolak permohonan Otoritas Pajak atas masa pajak November dan Desember 2011.

Pada tanggal 3 Mei 2016, Otoritas Pajak menerbitkan surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2012. Pada tanggal 3 November 2016, Otoritas Pajak menerbitkan SKPKB PPh Badan senilai Rp991,6 miliar (termasuk denda Rp321,6 miliar), SKPKB PPN senilai Rp467 miliar (termasuk denda Rp153,5 miliar), SKPKB PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ("JKP") dari Luar Daerah Pabean senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta), SKPKB PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp57 miliar (termasuk denda Rp18,5 miliar), tagihan pajak PPN senilai Rp37,5 miliar, SKPKB PPh pasal 21 senilai Rp16,2 miliar (termasuk denda Rp5,3 miliar), SKPKB PPh Final pasal 21 senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp407 juta), SKPKB PPh pasal 23 senilai Rp63,5 miliar (termasuk denda Rp20,6 miliar), SKPKB PPh pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar) dan SKPKB PPh pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64 miliar). Perusahaan telah menyetujui senilai Rp35 miliar terkait Perhitungan Kembali Pengkreditan Pajak Masukan atas Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi *International Incoming Call*, Rp613 juta atas Pajak Penghasilan, dan Rp311,5 juta atas PPh pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016. Atas bagian lainnya, pada tanggal 16 November 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan.

Pada tanggal 19 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan untuk Pajak penghasilan dan PPh Badan dengan rincian kurang bayar Pajak PPh Pasal 21 senilai Rp20,7 miliar (termasuk denda Rp6,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 21 Final senilai Rp23,8 miliar (termasuk denda Rp7,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 23 senilai Rp115,7 miliar (termasuk denda Rp37,5 miliar), kurang bayar PPh Pasal 4(2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64,1 miliar) dan kurang bayar PPh Badan senilai Rp496,4 miliar (termasuk denda Rp161 miliar). Pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan untuk PPN Masa Januari s.d. Desember 2012 dengan total Rp429,3 miliar (termasuk denda Rp141,2 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 17 dan 26 Januari 2018, Perusahaan mengajukan banding dan telah menempuh serangkaian sidang banding. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih menunggu hasil putusan banding.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2015 atas lebih bayar pajak PPh Badan senilai Rp414 miliar. Pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN Dalam Negeri senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4 miliar), SKPKB PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar (termasuk denda Rp17 miliar). Perusahaan menerima STP atas PPN Dalam Negeri senilai Rp34 miliar, PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp7 miliar dan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar.

Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan senilai Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar yang sebelumnya dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015 ke SPT PPh Badan tahun 2016. Perusahaan juga menerima ketetapan kurang bayar PPN, kurang bayar PPN atas Pemungut Pajak, serta STP PPN senilai Rp26 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017.

Pada tanggal 24 Juli 2017, Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Otoritas Pajak untuk SKPLB PPh Badan dengan keberatan senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar. Pada tanggal 3 dan 22 Mei 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp54 miliar dan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 18 Juli 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menambah jumlah pajak yang masih harus diterima senilai Rp76 miliar. Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan mengajukan banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses banding masih berlangsung.

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2016 atas lebih bayar PPh Badan senilai Rp114,4 miliar. Pada tanggal 7 Juni 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp15,3 miliar, SKPKB PPh 26 senilai Rp557 juta (termasuk denda Rp180 juta) dan SKPLB PPN senilai Rp923 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp15,3 miliar dan saldo tersisa senilai Rp99,1 miliar telah dibebankan sebagai pajak kini atas pemeriksaan pajak, PPh 26, kredit pajak PPN senilai Rp10,5 miliar, STP PPN Pemungutan oleh Pemungut senilai Rp7,1 miliar, PPN atas pemberian cuma-cuma senilai Rp7,3 miliar, PPN atas pengalihan aset senilai Rp1,2 miliar dan STP PPN senilai Rp1,7 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp882,7 miliar dan untuk sisa saldo sebesar Rp39,9 miliar telah dikompensasikan ke STP PPN senilai Rp31,9 miliar, PPN atas Pemungut Pajak senilai Rp7,1 miliar, PPh 23 senilai Rp556 juta dan PPh 21 senilai Rp300 juta. Atas surat ketetapan tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2018, Perusahaan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terkait Interkoneksi *International Incoming Call* senilai Rp151 miliar dan STP PPN senilai Rp30,3 miliar. Pada tanggal 11 Maret 2019, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan atas keberatan Perusahaan, di mana Otoritas Pajak mengabulkan semua keberatan Perusahaan dan penambahan jumlah kelebihan bayar untuk masa pajak Januari s.d. April 2016. Selanjutnya, pada bulan Mei 2019, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan Perusahaan dan mengabulkan seluruh keberatan Perusahaan untuk masa pajak Mei s.d. Desember 2016.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 11 September 2017 dan 9 Januari 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa Pajak Desember dan November 2014 untuk klaim restitusi Lebih Bayar Pembetulan SPT PPN masa pajak Desember dan November 2014, masing-masing senilai Rp129 miliar dan Rp86,7 miliar. Pada tanggal 25 Juli dan 7 September 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB untuk masa pajak Desember dan November 2014. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp122,5 miliar untuk masa pajak Desember 2014. Pada bulan Oktober 2018, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp80,8 miliar dan Rp3,6 miliar yang telah dikompensasikan sebagai pembayaran SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean masa pajak Maret, April dan Juni 2015, STP PPN masa November 2014 dan surat ketetapan pajak lainnya.

Pada tanggal 6 November 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2017. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses pemeriksaan masih berlangsung.

(ii) Telkomsel

Pada bulan Desember 2013, Pengadilan Pajak telah menerima banding Telkomsel atas PPN dan *withholding tax* tahun 2006 dengan total Rp116 miliar. Pada bulan Februari 2014, Telkomsel menerima pengembalian pajak. Pada tanggal 3 Juli 2015, dalam hal menanggapi surat Telkomsel untuk klaim pendapatan bunga atas putusan PPN dan Pemotongan Pajak yang menguntungkan tahun 2006, Otoritas pajak menginformasikan bahwa klaim tersebut tidak bisa dijamin sampai Otoritas Pajak mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 19 Agustus 2016, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan uji materi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas PPN sebesar Rp108 miliar. Kontra memorandum untuk pengujian uji materi telah dikirim pada tanggal 14 September 2016. Pada bulan April 2017, Otoritas Pajak telah menjamin klaim Telkomsel atas pendapatan bunga yang akan dikompensasikan ke pembayaran cicilan PPh Badan untuk periode April 2017. Pada bulan Juli 2018, Telkomsel menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung yang menolak permintaan Otoritas Pajak.

Pada bulan Mei dan Juni 2012, Telkomsel menerima pengembalian denda atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk tahun 2010 senilai Rp15,7 miliar berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 17 Juli 2012, Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 14 September 2012, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada bulan Juli 2016, Telkomsel mengakui denda pajak senilai Rp15,7 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 24 Mei 2012, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp290,6 miliar (termasuk denda Rp67 miliar) untuk tahun 2010 dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 9 Mei 2017, Telkomsel menerima keputusan dari Mahkamah Agung yang menolak banding Telkomsel, sehingga atas kurang bayar PPN tersebut telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Juli 2017. Pada tanggal 19 Juli 2017, Telkomsel mengajukan peninjauan kembali tahap kedua atas keputusan Mahkamah Agung. Pada tanggal 8 Agustus 2018, Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan banding Telkomsel. Pada tanggal 18 Februari 2019, Telkomsel menerima SP2PK dari Kantor Pajak terkait PPN tahun fiskal 2010 senilai Rp290 miliar. Pada tanggal 25 Maret 2019, Telkomsel menerima pembayaran SP2PK dari Kantor Pajak terkait PPN tahun fiskal 2010 senilai Rp290 miliar.

Di bulan Juli dan Oktober 2017, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali atas kurang bayar PPh Badan dan PPN masing-masing senilai Rp62 miliar dan Rp1,2 miliar. Atas hal ini, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali di bulan Agustus dan November 2017. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel telah menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung secara parsial, dimana Mahkamah Agung menolak permintaan Otoritas Pajak berkaitan dengan PPN senilai Rp1,1 miliar.

Pada tanggal 28 Juli 2016 dan 24 Maret 2017, Telkomsel telah menerima surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan pajak masing-masing untuk tahun fiskal 2014 dan 2015. Pada tanggal 27 Mei 2019, Telkomsel menerima pemberitahuan temuan pemeriksaan pajak tahun fiskal 2015 dari Otoritas Pajak sebesar Rp459 miliar (termasuk denda Rp153 miliar). Telkomsel menerima hasil tersebut sebesar Rp380 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel masih belum menerima SKPKB secara resmi. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2014 sebesar Rp150,6 miliar (termasuk denda Rp54,6 miliar). Pada tanggal 27 Juni 2019, Telkomsel melakukan pembayaran atas STP tersebut sebesar Rp16,5 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel masih melakukan penilaian atas sisa nilai sebesar Rp134,1 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	(Dibebankan) Dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	Dikreditkan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	(Dibebankan) ke ekuitas dan reklasifikasi	30 Juni 2019
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi penurunan nilai piutang	632	156	-	-	788
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	663	(30)	-	-	633
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	420	(126)	-	-	294
Provisi imbalan karyawan	215	(64)	-	-	151
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	79	33	-	-	112
Pendapatan instalasi tangguhan	92	15	-	-	107
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	9	7	-	-	16
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.110</u>	<u>(9)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.101</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(1)	(1)	-	-	(2)
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	-	-	(11)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(12)</u>	<u>(1)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(13)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>2.098</u>	<u>(10)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.088</u>
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>406</u>	<u>37</u>	<u>-</u>	<u>(92)</u>	<u>351</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	641	56	-	-	697
Provisi penurunan nilai piutang	270	75	-	-	345
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>911</u>	<u>131</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.042</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(896)	(99)	-	-	(995)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(616)	(39)	-	-	(655)
Aset takberwujud	(118)	(13)	-	-	(131)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.630)</u>	<u>(151)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.781)</u>
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	<u>(719)</u>	<u>(20)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(739)</u>
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>(533)</u>	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(522)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(1.252)</u>	<u>(9)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.261)</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>2.504</u>	<u>27</u>	<u>-</u>	<u>(92)</u>	<u>2.439</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2017	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	Dikreditkan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	(Dibebankan) ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2018
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	1.102	27	(466)	-	663
Provisi penurunan nilai piutang	594	38	-	-	632
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	240	180	-	-	420
Provisi imbalan karyawan	247	(32)	-	-	215
Pendapatan instalasi tangguhan	74	18	-	-	92
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	43	36	-	-	79
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(1)	10	-	-	9
Rugi fiskal	172	(172)	-	-	-
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.471</u>	<u>105</u>	<u>(466)</u>	<u>-</u>	<u>2.110</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	1	(2)	-	-	(1)
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	-	-	(11)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(10)</u>	<u>(2)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan					
Perusahaan - bersih	<u>2.461</u>	<u>103</u>	<u>(466)</u>	<u>-</u>	<u>2.098</u>
Aset pajak tangguhan					
entitas anak lainnya - bersih	<u>343</u>	<u>76</u>	<u>(8)</u>	<u>(5)</u>	<u>406</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	677	83	(119)	-	641
Provisi penurunan nilai piutang	184	86	-	-	270
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>861</u>	<u>169</u>	<u>(119)</u>	<u>-</u>	<u>911</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(561)	(335)	-	-	(896)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(552)	(64)	-	-	(616)
Aset takberwujud	(225)	107	-	-	(118)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.338)</u>	<u>(292)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.630)</u>
Liabilitas pajak tangguhan					
Telkomsel - bersih	<u>(477)</u>	<u>(123)</u>	<u>(119)</u>	<u>-</u>	<u>(719)</u>
Liabilitas pajak tangguhan					
entitas anak lainnya - bersih	<u>(456)</u>	<u>(50)</u>	<u>(5)</u>	<u>(22)</u>	<u>(533)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(933)</u>	<u>(173)</u>	<u>(124)</u>	<u>(22)</u>	<u>(1.252)</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>2.804</u>	<u>179</u>	<u>(474)</u>	<u>(5)</u>	<u>2.504</u>

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp23.706 miliar dan Rp31.461 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

g. Administrasi

Sejak tahun 2008 s.d. 2018, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015, serta PMK No. 238/PMK.03/2008. Berdasarkan hal tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 20%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi (lanjutan)

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anaknya dalam negeri menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Otoritas Pajak dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No. 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana telah diubah terakhir oleh PMK No.16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan ditetapkan sebagai PKP Beresiko Rendah melalui Keputusan DJP No.KEP-00080/WPJ.19/KP.04/2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018, maka Perusahaan dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

26. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp11.078 miliar dan Rp8.698 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama tahun berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp111,83 dan Rp87,80 (dalam jumlah penuh) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018.

27. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 54 tertanggal 27 April 2018, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk tahun buku 2017 masing-masing sebesar Rp13.287 miliar (Rp134,13 per lembar saham) dan Rp3.322 miliar (Rp33,53 per lembar saham).

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 133 tertanggal 24 Mei 2019, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk tahun buku 2018 masing-masing sebesar Rp10.819 miliar (Rp109,2 per lembar saham) dan Rp5.410 miliar (Rp54,61 per lembar saham).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

28. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	28a.i.a		
Manfaat pasti	28a.i.a.i	1.155	1.057
Manfaat tambahan	28a.i.a.ii	6	6
Perusahaan - <i>unfunded</i>	28a.i.b	1.613	1.830
Telkomsel	28a.ii	1.701	1.541
Telkomsat		0	0
MD Media		0	0
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		<u>4.475</u>	<u>4.434</u>
Imbalan kesehatan pasca kerja	28b	297	195
Imbalan pasca kerja lainnya	28c	388	419
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	28d	<u>557</u>	<u>507</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya		<u>5.717</u>	<u>5.555</u>

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	28a.i.a		
Manfaat pasti	28a.i.a.i	193	263
Manfaat tambahan	28a.i.a.ii	-	35
Perusahaan - <i>unfunded</i>	28a.i.b	82	99
Telkomsel	28a.ii	160	174
Beban pensiun	22	<u>435</u>	<u>571</u>
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	22,28b	102	177
Beban imbalan pasca kerja lainnya	22,28c	16	16
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	22,28d	<u>73</u>	<u>46</u>
Jumlah		<u>626</u>	<u>810</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

a. *Funded*

i. Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini diatur didalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Dapen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp104 miliar. Perusahaan tidak memberikan kontribusi kepada Dapen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	20.121	22.354
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	129	384
Beban bunga	800	1.459
Kontribusi peserta program pensiun	17	38
Rugi (laba) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	655	(2.691)
Pembayaran pensiun	(733)	(1.423)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>20.989</u>	<u>20.121</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	19.064	20.814
Pendapatan bunga	762	1.357
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	655	(1.455)
Kontribusi pemberi kerja	104	-
Kontribusi peserta program pensiun	17	38
Pembayaran pensiun	(733)	(1.423)
Penyisihan manfaat tambahan	-	(205)
Beban administrasi program	(35)	(62)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	<u>19.834</u>	<u>19.064</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>1.155</u>	<u>1.057</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, aset program terdiri dari:

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	951	-	873	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.713	-	1.456	-
Barang konsumen	1.197	-	1.336	-
Infrastruktur, peralatan dan transportasi	576	-	530	-
Konstruksi, properti dan real estat	225	-	199	-
Industri dasar dan bahan kimia	97	-	124	-
Perdagangan, jasa dan investasi	463	-	420	-
Tambang	167	-	112	-
Agrikultur	46	-	55	-
Industri lainnya	333	-	362	-
Reksadana berbasis saham	1.105	-	1.336	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	5.646	-	5.267
Obligasi pemerintah	6.368	-	6.166	-
Reksadana	92	-	54	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	298	-	288
Properti	-	174	-	178
Lainnya	-	384	-	308
Jumlah	13.333	6.502	13.023	6.041

Aset program pensiun termasuk didalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp375 miliar dan Rp372 miliar, yang mewakili 1,89% dan 1,95% dari total aset program pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp331 miliar dan Rp314 miliar mewakili masing-masing 1,67% dan 1,65% dari total aset per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp1.127 miliar dan Rp(158) miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen diatas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 30 Juni 2019, RKD Dapen dibawah 105% sehingga Perusahaan akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2019.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen, Perusahaan memberikan manfaat lain berupa manfaat tambahan di tahun 2017 sebesar Rp4,5 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002 dan Rp2,25 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sejak akhir bulan Juni 2002 sampai dengan akhir April 2017.

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (beban manfaat pensiun dibayar di muka) pada awal tahun	1.057	1.540
Beban pensiun berkala bersih	202	548
Penyisihan manfaat tambahan	-	205
Kontribusi pemberi kerja	(104)	-
Rugi (laba) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	655	(2.691)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(655)	1.455
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>1.155</u>	<u>1.057</u>

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban jasa	129	192
Beban administrasi program	38	35
Beban bunga bersih	35	51
Beban pensiun berkala bersih	202	278
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(9)	(15)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	<u>193</u>	<u>263</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rugi (laba) aktuarial yang diakui pada periode berjalan	655	(1.667)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	<u>(655)</u>	<u>1.667</u>
Jumlah bersih	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,25%	6,75%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

ii. Manfaat tambahan

Berdasarkan peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang peraturan dana pensiun dari Dapen, Perusahaan membentuk dana manfaat tambahan yang bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan RKD diatas 105% dan tingkat pengembalian investasi diatas suku bunga aktuarial untuk pendanaan.

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	104	1.076
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa lalu	-	-
Beban bunga	4	69
Laba aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(1)	(948)
Pembayaran pensiun	<u>(96)</u>	<u>(93)</u>
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u><u>11</u></u>	<u><u>104</u></u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan (lanjutan)

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	98	-
Pendapatan bunga dari aset	4	-
Penyisihan manfaat tambahan	-	205
Pengembalian atas aset program pensiun	(1)	(14)
Pembayaran manfaat pensiun	(96)	(93)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	<u>5</u>	<u>98</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u><u>6</u></u>	<u><u>6</u></u>

Pada tanggal 30 Juni 2019 belum terdapat aset program manfaat tambahan. Aset program baru akan dicatat sesuai dengan cadangan dana manfaat tambahan yang akan ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Perubahan liabilitas manfaat tambahan pensiun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas manfaat tambahan pensiun pada awal tahun	6	1.076
Beban bunga	-	69
Penyisihan manfaat tambahan	-	(205)
Laba aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(1)	(948)
Pengembalian aset program pensiun	1	14
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u><u>6</u></u>	<u><u>6</u></u>

Komponen beban manfaat tambahan pensiun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban jasa lalu	-	-
Beban bunga	-	35
Beban pensiun	<u><u>-</u></u>	<u><u>35</u></u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan	(1)	18
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	1	(18)
Jumlah bersih	-	-

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat tambahan dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Tingkat pengembalian investasi	9,30%-10,00%	9,50%-10,25%
Tingkat diskonto	8,25%	6,75%
Tingkat suku bunga aktuarial pendanaan	9,25%-9,50%	9,25%-9,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

b. *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8 miliar dan Rp13 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan *uniformation* bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun dihitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan *uniformation* dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Sejak tahun 2012, Perusahaan memberlakukan ketentuan baru MPP yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 April 2012, dimana karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan apabila tidak mengajukan MPP, maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	1.830	2.384
Beban jasa	15	54
Beban bunga bersih	67	144
Laba aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(137)
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(299)	(615)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir periode	1.613	1.830

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Beban jasa	15	27
Beban bunga bersih	67	72
Jumlah	82	99

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar RpNihil

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Tingkat diskonto	8,00%-8,25%	6,00%-6,75%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Telkomsel tidak melakukan kontribusi kepada Jiwasraya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	2.734	2.928
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	93	213
Beban bunga	106	203
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(583)
Pembayaran pensiun	-	(27)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>2.933</u>	<u>2.734</u>

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	1.193	1.089
Pendapatan bunga	39	74
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(68)
Kontribusi pemberi kerja	-	125
Pembayaran pensiun	-	(27)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	<u>1.232</u>	<u>1.193</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>1.701</u>	<u>1.541</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	1.541	1.839
Beban manfaat pensiun	160	342
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(583)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	68
Kontribusi pemberi kerja	-	(125)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	<u>1.701</u>	<u>1.541</u>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban jasa	93	107
Beban bunga bersih	67	67
Jumlah	<u>160</u>	<u>174</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan laporan tertanggal masing-masing 14 Februari 2019 dan 8 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,25%	7,00%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yakes.

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	12.423	15.448
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	532	1.102
Rugi (laba) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	535	(3.641)
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(284)	(486)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	13.206	12.423
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	12.228	13.029
Pendapatan bunga	523	927
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	535	(1.082)
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(284)	(486)
Beban administrasi program	(93)	(160)
Nilai wajar aset program pada akhir periode	12.909	12.228
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	297	195

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, aset program terdiri dari:

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	750	-	1.115	-
Saham publik:				
Manufaktur dan konsumen	728	-	799	-
Industri keuangan	1.000	-	799	-
Konstruksi	223	-	190	-
Infrastruktur dan telekomunikasi	349	-	332	-
Grosir	208	-	177	-
Tambang	103	-	77	-
Industri lainnya:				
Jasa	63	-	60	-
Agrikultur	31	-	32	-
Bioteknologi dan industri farmasi	87	-	85	-
Lainnya	4	-	3	-
Reksadana berbasis ekuitas	1.210	-	1.204	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	7.723	-	7.020	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	431	-	335
Jumlah	12.479	431	11.893	335

Aset program Yakes juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp259 miliar dan Rp249 miliar yang merupakan 2,00% dan 2,03% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp965 miliar dan Rp(315) miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	195	2.419
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	102	335
Rugi (laba) aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	535	(3.641)
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(535)	1.082
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	297	195

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban administrasi program	93	89
Beban bunga bersih	9	88
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	<u>102</u>	<u>177</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rugi (laba) aktuarial yang diakui pada periode berjalan	535	(1.097)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(535)	1.097
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,75%	7,25%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2018	2018
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal tahun	419	510
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	2	6
Beban bunga bersih	14	26
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(24)
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(47)	(99)
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir periode	<u>388</u>	<u>419</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban jasa	2	3
Beban bunga bersih	14	13
Jumlah	<u>16</u>	<u>16</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,00%	5,75%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

d. Kewajiban pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp557 miliar dan Rp507 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp73 miliar dan Rp46 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (Catatan 22).

e. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk 2018 adalah sebagai berikut (dalam miliaran Rupiah):

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat					
	<u>Perusahaan</u>			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
	<i>Funded</i>		<i>Unfunded</i>			
Manfaat pasti	Manfaat tambahan					
Dalam 10 tahun kedepan	15.673	-	648	2.498	5.336	438
Dalam 10-20 tahun	20.349	-	160	7.880	6.913	91
Dalam 20-30 tahun	16.207	20	29	6.680	6.217	39
Dalam 30-40 tahun	9.400	38	9	1.580	3.193	3
Dalam 40-50 tahun	3.383	30	-	-	661	-
Dalam 50-60 tahun	644	50	-	-	22	-
Dalam 60-70 tahun	62	101	-	-	0	-
Dalam 70-80 tahun	2	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	9,11 tahun	9,11 tahun	3,97 tahun	10,58 tahun	17,41 tahun	3,13 tahun

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

f. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak pada 30 Juni 2019 atas liabilitas manfaat pasti sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
Sensitivitas				
Didanai				
Manfaat pasti	(1.636)	1.911	287	(298)
Manfaat tambahan	(2)	(1)	-	-
Tidak didanai	(37)	34	38	(41)
Telkomsel	(498)	563	295	(277)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.518)	1.929	1.895	(1.603)
Imbalan pasca kerja lainnya	(11)	12	-	-

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut diatas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

29. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp895 miliar dan Rp852 miliar masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp76 miliar dan Rp70 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (Catatan 22).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Hubungan</u>	<u>Sifat Saldo Akun/ Transaksi</u>
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasional dan perbaikan, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sependengali	Pendapatan interkoneksi, beban sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sependengali	Beban listrik, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, investasi pada instrumen keuangan
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bank milik negara Bank Mandiri	Entitas sependengali Entitas sependengali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan
BRI	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BTN	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
PT Kereta Api Indonesia ("KAI")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Mandiri Manajemen Investasi Bahana TCW	Entitas sependengali Entitas sependengali	Aset keuangan tersedia untuk dijual Aset keuangan tersedia untuk dijual, dan obligasi
SMI Tiphone	Entitas sependengali Entitas asosiasi	Biaya pendanaan
PT Poin Multi Media Nusantara ("POIN")	Entitas berelasi lainnya	Distribusi kartu SIM dan vauzer prabayar Pembelian <i>handset</i>
PT Perdana Mulia Makmur ("PMM")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian <i>handset</i>
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopeptel")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban jasa penagihan, beban jasa-jasa lainnya, distribusi kartu SIM dan vauzer prabayar, dan pembelian aset tetap
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa jaringan, beban operasi dan pemeliharaan, pembelian aset tetap dan jasa konstruksi dan distribusi kartu SIM dan vauzer prabayar
Direksi Komisaris	Personil manajemen kunci Personil pengawas	Gaji dan fasilitas Gaji dan fasilitas

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 30 Juni 2019, Grup mencatat adanya pengurangan nilai provisi yang diakui selama tahun berjalan dari pihak berelasi sebesar Rp(20) miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi:

	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	57	0,08	66	0,10
Entitas sepengendali				
Indosat	458	0,66	550	0,85
BRI	356	0,51	143	0,22
BTN	138	0,20	47	0,07
KAI	81	0,12	18	0,03
Pertamina	83	0,12	33	0,05
Bank Mandiri	76	0,11	66	0,10
Lain-lain	737	1,06	471	0,72
Sub-jumlah	<u>1.929</u>	<u>2,78</u>	<u>1.328</u>	<u>2,04</u>
Entitas berelasi lainnya	42	0,06	26	0,04
Entitas asosiasi	38	0,05	22	0,03
Jumlah	<u>2.066</u>	<u>2,97</u>	<u>1.442</u>	<u>2,21</u>

	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Entitas sepengendali				
PLN	1.039	2,18	1.260	2,72
Indosat	361	0,76	490	1,06
Lain-lain	157	0,33	208	0,45
Sub-jumlah	<u>1.557</u>	<u>3,27</u>	<u>1.958</u>	<u>4,23</u>
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	446	0,94	383	0,83
Kisel	436	0,91	457	0,99
PMM	425	0,89	425	0,92
POIN	425	0,89	425	0,92
Lain-lain	122	0,26	170	0,36
Sub-jumlah	<u>1.854</u>	<u>3,89</u>	<u>1.860</u>	<u>4,02</u>
Entitas asosiasi	118	0,25	160	0,35
Jumlah	<u>3.529</u>	<u>7,41</u>	<u>3.978</u>	<u>8,60</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan):

	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
PENGHASILAN PENDANAAN				
Entitas sependengali				
Bank milik negara	429	67,35	383	61,87
Lain-lain	1	0,16	5	0,81
Jumlah	430	67,51	388	62,68
	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
BIAYA PENDANAAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	18	0,88	22	1,41
Entitas sependengali				
Bank milik negara	518	25,27	418	26,81
SMI	45	2,20	50	3,21
Jumlah	581	28,35	490	31,43
	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
PEMBELIAN ASET TETAP (Catatan 9)				
Entitas sependengali	25	0,17	68	0,48
Entitas berelasi lainnya	126	0,83	206	1,46
Jumlah	151	1,00	274	1,94
	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
DISTRIBUSI KARTU SIM DAN VAUCER				
Entitas berelasi lainnya				
Tiphone	2.790	4,02	1.983	3,08
Kisel	2.096	3,02	2.174	3,38
Gratika	324	0,47	198	0,31
Jumlah	5.210	7,51	4.355	6,77

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Saldo akun dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a. Kas dan setara kas (Catatan 3)	12.940	6,00	13.205	6,40
b. Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	761	0,35	417	0,23
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	2.687	1,25	2.126	1,03
d. Aset lancar lainnya (Catatan 7)	103	0,05	159	0,08
e. Aset tidak lancar lainnya (Catatan 10)	20	0,01	44	0,02
	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
f. Utang usaha (Catatan 12)				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	35	0,03	2	0,00
Entitas sependengali				
Indosat	116	0,11	122	0,14
BUMN	452	0,42	294	0,33
Sub-jumlah	568	0,53	416	0,47
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	177	0,16	279	0,31
Lain-lain	198	0,18	296	0,33
Sub-jumlah	375	0,34	575	0,64
Jumlah	978	0,90	993	1,11
g. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 13)				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	7	0,01	7	0,01
Entitas sependengali				
BUMN	106	0,10	86	0,10
Bank milik negara	105	0,10	61	0,07
Sub-jumlah	211	0,20	147	0,17
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	191	0,18	183	0,21
Lain-lain	11	0,00	13	0,01
Jumlah	420	0,39	350	0,40
h. Uang muka pelanggan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	19	0,02	19	0,02
Entitas sependengali				
PLN	8	0,01	12	0,01
Jumlah	27	0,03	31	0,03
i. Utang bank jangka pendek (Catatan 15)	1.397	1,30	956	1,08
j. Pinjaman penerusan (Catatan 16a)	850	0,79	949	1,07
k. Utang bank jangka panjang (Catatan 16c)	20.054	18,68	12.620	14,19
l. Pinjaman lainnya (Catatan 16d)	3.941	0,04	2.244	2,52

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 16a).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak (*“Public Switched Telephone Network”* atau *“PSTN”*) milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan *“007”*.

ii. Indosat

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif di tahun berjalan dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan Lintasarta. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

iii. Lain-lain

Kisel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, percetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan voucher pulsa isi ulang.

d. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Dewan Direksi	240	0,50%	226	0,49%
Dewan Komisaris	16	0,03%	74	0,16%

Jumlah yang disajikan pada tabel diatas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

31. SEGMENT OPERASI

Pada tahun 2017, Manajemen melakukan penataan kembali pengelolaan portofolio bisnis Grup dari pengelolaan menggunakan pendekatan berbasis kelompok pelanggan menjadi pendekatan berbasis *Customer Facing Unit* ("CFU") agar Grup dapat berfokus pada pasar pelanggan yang lebih spesifik. Hal ini diikuti dengan perubahan struktur organisasi Grup untuk mengakomodasi pengambilan keputusan dan melakukan penilaian kinerja berdasarkan pendekatan berbasis CFU.

Grup memiliki empat segmen dilaporkan utama, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise* dan WIB. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, SMS, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, data, internet, dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen WIB menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkuit, satelit, VSAT, *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke operator telekomunikasi lainnya dan pelanggan internasional. Segmen lain-lain merupakan segmen *digital services* yang tidak memenuhi persyaratan pengungkapan dari laporan segmen ini. Tidak terdapat segmen operasi yang digabungkan dalam menentukan laporan segmen.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai yang dipercaya manajemen untuk merepresentasikan nilai pasar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	2019					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	43.523	8.359	11.942	5.983	93	69.900	(555)	69.345
Pendapatan antar segmen	1.574	315	9.925	8.056	625	20.495	(20.495)	-
Jumlah pendapatan segmen	45.097	8.674	21.867	14.039	718	90.395	(21.050)	69.345
Beban								
Beban eksternal	(20.811)	(5.835)	(11.740)	(7.651)	(729)	(46.766)	(369)	(47.135)
Beban antar segmen	(7.439)	(1.971)	(8.741)	(2.393)	(28)	(20.572)	20.572	-
Jumlah beban segmen	(28.250)	(7.806)	(20.481)	(10.044)	(757)	(67.338)	20.203	(47.135)
Hasil segmen	16.847	868	1.386	3.995	(39)	23.057	(847)	22.210
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(5.910)	(3.216)	(2.280)	(3.511)	(9)	(14.926)	(201)	(15.127)
Penyusutan dan amortisasi	(6.885)	(1.813)	(1.288)	(1.509)	(11)	(11.506)	39	(11.467)
Provisi diakui selama periode berjalan	(301)	(300)	(456)	(42)	-	(1.099)	(13)	(1.112)

	2018					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	41.022	6.415	12.317	4.348	46	64.148	220	64.368
Pendapatan antar segmen	1.708	1.078	8.130	8.189	420	19.525	(19.525)	-
Jumlah pendapatan segmen	42.730	7.493	20.447	12.537	466	83.673	(19.305)	64.368
Beban								
Beban eksternal	(20.143)	(5.806)	(11.842)	(6.817)	(478)	(45.086)	(1.182)	(46.268)
Beban antar segmen	(7.502)	(2.400)	(7.813)	(3.111)	(27)	(20.853)	20.853	-
Jumlah beban segmen	(27.645)	(8.206)	(19.655)	(9.928)	(505)	(65.939)	19.671	(46.268)
Hasil segmen	15.085	(713)	792	2.609	(39)	17.734	366	18.100
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(6.958)	(2.573)	(2.083)	(2.135)	(11)	(13.760)	(378)	(14.138)
Penyusutan dan amortisasi	(6.692)	(1.373)	(986)	(1.517)	(10)	(10.578)	247	(10.331)
Provisi diakui selama periode berjalan	(252)	(220)	(660)	(53)	-	(1.185)	(3)	(1.188)

Penyesuaian dan eliminasi:

	2019	2018
Hasil segmen	23.057	17.734
Rugi usaha unit bisnis	(275)	(1.114)
Eliminasi dan penyesuaian lainnya	572	1.480
Laba usaha konsolidasi	22.210	18.100

Informasi Geografis:

Informasi pendapatan di bawah berdasarkan lokasi unit bisnis.

	2019	2018
Pendapatan eksternal		
Indonesia	66.949	62.976
Luar negeri	2.396	1.392
Jumlah	69.345	64.368

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	148.762	144.631
Luar negeri	3.451	3.649
Jumlah	<u>152.213</u>	<u>148.280</u>

32. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No.09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
 - Tarif jelajah, dan/atau
 - Tarif jasa multimedia,
- dengan struktur tarif sebagai berikut:
- Biaya aktivasi
 - Biaya berlangganan bulanan
 - Biaya penggunaan
 - Biaya fasilitas tambahan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (“BRTI”), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi (“DPI”) kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/I/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang “Sewa Jaringan”, Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang “Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan”, sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 30 Juni 2019, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	9.122
Dolar A.S.	137	1.931
Euro	1,45	23
HKD	17,15	31
TWD	8,08	4
Jumlah		11.111

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Indonesia Global Gateway
Perusahaan dan Konsorsium Bisnis Submarine Cable	10 November 2017	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan (SKKL) Sabang-Lhoksemawe-Medan
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	22 Desember 2017	Perjanjian Pengadaan ONT Retail Platform ZTE
Perusahaan dan PT Sisindokom Lintas Buana	8 April 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan PE-VPN Cisco
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	6 April 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Dual Wavelength Division Multiplexing ("DWDM") Platform Nokia 2018
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	3 Mei 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM Platform Huawei
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	7 Mei 2018	Perjanjian Pengadaan Pemasangan DWDM Platform Nokia - RAFI
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	7 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan ISP SKKL NARU 2018
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	13 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan ISP SKKL Platform NEC untuk NARU 2018 dan Reengineering Transport
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	17 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro-E, BRAS, PCEF
Perusahaan dan PT Master System Infotama	31 Desember 2018	Pengadaan dan Pemasangan Ekspan IP Backbone Platform CISCO
Perusahaan dan PT Ericsson Indonesia	14 Januari 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Radio IP Backhaul Node B Telkomsel Platform Ericsson
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	27 Maret 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Radio IP

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG	17 April 2008	Perjanjian Pembangunan Jaringan Kombinasi 2G dan 3G
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia dan PT Nokia Siemens Networks	17 April 2008	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan dan Jasa Terkait Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian Online Charging System ("OCS") and Service Control Points ("SCP") System Solution Development
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian Technical Support untuk Menyediakan Jasa technical support untuk OCS dan SCP
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	5 Juli 2011	Perjanjian untuk Pengembangan dan Perpanjangan Customer Relationship Management dan Contact Center Solutions
Telkomsel dan PT Huawei	25 Maret 2013	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan Gateway GPRS Support Node ("GGSN") Service Complex
Telkomsel and Wipro Limited, Wipro Singapore Pte, Ltd, and PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan OSDSS Solution
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan GGSN Service Complex Rollout

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 30 Juni 2019, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	500	14 Maret 2020	Rp	36
BNI	500	31 Maret 2020	Rp	185
Bank Mandiri	500	23 Desember 2019	Rp	131
Jumlah	1.500			352

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (lanjutan)

- (ii) Telkomsel memiliki fasilitas jaminan, bank garansi dan fasilitas *standby letter of credit* sebesar US\$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BRI sebesar Rp1.000 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 25 September 2022. Pada tanggal 30 Juni 2019, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp531 miliar sebagai garansi atas perjanjian pembayaran untuk biaya hak pakai tahunan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan sebesar Rp20 miliar sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 (Catatan 33c.i).

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BCA sebesar Rp150 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 15 April 2020.

Telkomsel juga memiliki fasilitas bank garansi dengan BNI sebesar Rp2.100 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2019. Telkomsel menggunakan fasilitas ini untuk menggantikan deposito berjangka yang dijadikan jaminan yang dipersyaratkan untuk program KPU sebesar Rp52,2 miliar (Catatan 33c.iii) dan untuk *surety bond* sebesar Rp1.030 miliar sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio 2,3 GHz (Catatan 33c.i).

- (iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta setara dengan Rp202 miliar dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui sesuai dengan addendum VII (ketujuh) pada tanggal 7 Januari 2019 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$25 juta setara dengan Rp353 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 18 Desember 2019. Per tanggal 30 Juni 2019, TII belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.
- (iv) Pada tanggal 30 Juni 2019, Sigma memiliki fasilitas bank garansi dari BNI dan HSBC sebesar Rp350 miliar.

c. Lainnya

- (i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tanggal 2 November 2015, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.76 tanggal 15 Desember 2010, Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900 MHz, dan 1800 MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan sejak 2010.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 1987 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017, yang menggantikan Surat Keputusan No. 42 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

1. Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
2. Layanan telekomunikasi dasar.

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, No. 191 Tahun 2013, No. 509 Tahun 2016, dan No. 1896 Tahun 2017, Telkomsel diharuskan, antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Mengeluarkan setiap tahunnya *performance bond* sebesar Rp20 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz dan *surety bond* sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz (Catatan 33b.ii).

(ii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2019 hingga 2028. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Sebagai <i>lessee</i>	19.624	5.714	10.052	3.858
Sebagai <i>lessor</i>	3.483	881	2.010	592

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iii) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Selanjutnya, Peraturan Menkominfo No. 17 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 19 tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 8 November 2016. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kontribusi pengembangan KPU berlaku efektif untuk tahun 2016 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, dalam hal penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Program KPU), penyedia dipilih melalui proses seleksi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"). BPPPTI menggantikan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 3 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018, BPPTI berganti nama menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"). Berikutnya, Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 10 tahun 2018.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No.792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BPPPTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp217 miliar, dan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel telah menerima pembayaran dari BPPPTI sebesar Rp83 miliar (sebelum pajak).

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, nilai tercatat piutang Telkomsel terkait program KPU tersebut yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif adalah sebesar Rp115 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	172,85	7,98	12,41	2.608
Aset keuangan lancar lainnya	13,13	-	2,25	209
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,58	-	-	9
Pihak ketiga	172,31	-	7,29	2.519
Piutang lain-lain	0,31	-	0,12	6
Aset lancar lainnya	0,75	-	0,55	14
Aset tidak lancar lainnya	63,06	-	-	883
Jumlah aset	<u>422,99</u>	<u>7,98</u>	<u>22,62</u>	<u>6.248</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,13)	-	-	(2)
Pihak ketiga	(154,19)	(44,77)	(5,07)	(2.239)
Utang lain-lain	(4,54)	-	(4,04)	(115)
Biaya yang masih harus dibayar	(50,68)	(14,34)	(2,06)	(743)
Pinjaman bank jangka pendek	(1,17)	-	-	(16)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,48)	-	-	(7)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(23,13)	(767,90)	(4,20)	(487)
Liabilitas lainnya	(13,46)	-	-	(190)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(77,82)	(3.455,54)	(2,56)	(1.590)
Jumlah liabilitas	<u>(325,60)</u>	<u>(4.282,55)</u>	<u>(17,93)</u>	<u>(5.389)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>97,39</u>	<u>(4.274,57)</u>	<u>4,69</u>	<u>859</u>
	31 Desember 2018			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	253,37	8,02	10,50	3.802
Aset keuangan lancar lainnya	14,56	-	1,30	223
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,49	-	-	7
Pihak ketiga	146,39	-	9,55	2.238
Piutang lain-lain	0,34	-	0,12	6
Aset lancar lainnya	-	-	0,51	14
Aset tidak lancar lainnya	57,42	-	1,17	840
Jumlah aset	<u>472,57</u>	<u>8,02</u>	<u>23,15</u>	<u>7.130</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,21)	-	-	(3)
Pihak ketiga	(206,20)	(33,39)	(4,99)	(3.037)
Utang lain-lain	(3,63)	-	(4,44)	(111)
Biaya yang masih harus dibayar	(47,10)	(15,64)	(2,51)	(709)
Pinjaman bank jangka pendek	(1,15)	-	-	(17)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,76)	-	-	(11)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(18,77)	(767,90)	(4,07)	(430)
Liabilitas lainnya	(19,63)	-	-	(284)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(93,41)	(3.839,49)	(4,71)	(1.917)
Jumlah liabilitas	<u>(390,86)</u>	<u>(4.656,42)</u>	<u>(20,72)</u>	<u>(6.519)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>81,71</u>	<u>(4.648,40)</u>	<u>2,43</u>	<u>611</u>

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2019 menggunakan kurs tanggal 30 Juli 2019, kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp4 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

a. Klasifikasi

i. Aset keuangan

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Utang dan piutang		
Kas dan setara kas	17.075	17.439
Aset keuangan lancar lainnya	1.614	834
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	16.319	12.141
Aset tidak lancar lainnya	444	460
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.295	1.204
Jumlah aset keuangan	<u>36.747</u>	<u>32.078</u>

ii. Liabilitas keuangan

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi		
Utang usaha dan utang lain-lain	15,943	15,214
Beban yang masih harus dibayar	13,095	12,769
Pinjaman		
Utang bank jangka pendek	4,517	4,043
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	850	949
Obligasi dan wesel bayar	10,483	10,481
Utang bank jangka panjang	34,979	23,225
Utang sewa pembiayaan	2,733	3,145
Pinjaman lainnya	3,941	2,244
Jumlah liabilitas keuangan	<u>86,541</u>	<u>72,070</u>

b. Nilai wajar

			Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
<u>30 Juni 2019</u>	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar			
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.295	1.295	454	-	841
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	850	810	-	-	810
Obligasi dan wesel bayar	10.483	11.208	9.707	-	1.501
Utang bank jangka panjang	34.979	33.878	-	-	33.878
Utang sewa pembiayaan	2.733	2.733	-	-	2.733
Pinjaman lainnya	3.941	3.699	-	-	3.699
Jumlah	<u>54.281</u>	<u>53.623</u>	<u>10.161</u>	<u>-</u>	<u>43.462</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Nilai wajar (lanjutan)

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
31 Desember 2018					
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.204	1.204	470	-	734
Jumlah	1.204	1.204	470	-	734
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	949	898	-	-	898
Obligasi	10.481	10.894	9.380	-	1.514
Utang bank jangka panjang	23.225	22.878	-	-	22.878
Utang sewa pembiayaan	3.145	3.145	-	-	3.145
Pinjaman lainnya	2.244	2.154	-	-	2.154
Liabilitas lainnya	261	261	-	-	261
Jumlah	41.509	41.434	9.850	-	31.584

Keuntungan atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 senilai Rp4 miliar. Tidak ada perpindahan antar hirarki nilai wajar selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

c. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan liabilitas tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya karena diukur berdasarkan hasil dari pendiskontoan arus kas di masa yang akan datang.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (i) Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar yang tersedia dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik valuasi. Nilai wajar obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (ii) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- a. Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- b. Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

2. Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,42	0,01	0,47	0,01
Liabilitas keuangan	(0,33)	(4,28)	(0,39)	(4,66)
Eksposur bersih	0,09	(4,27)	0,08	(4,65)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 30 Juni 2019 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

	Ekuitas/ laba (rugi)
30 Juni 2019	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	14
Yen Jepang (penguatan 5%)	(28)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 30 Juni 2019 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

b. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait penyertaan tersedia untuk dijual yang dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penyertaan tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja penyertaan tersedia untuk dijual Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 30 Juni 2019, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk penyertaan tersedia untuk dijual adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

c. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 15 dan 16). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Pinjaman bunga tetap	(27.373)	(21.260)
Pinjaman bunga mengambang	(30.130)	(22.827)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 30 Juni 2019, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp75 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

d. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	<u>30 Juni 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kas dan setara kas	17.075	17.439
Aset keuangan lancar lainnya	2.068	1.304
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	16.319	12.141
Aset tidak lancar lainnya	444	460
Jumlah	<u>35.906</u>	<u>31.344</u>

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan. Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup.

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 3,29% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2019.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio likuiditas dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

e. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2019	2020	2021	2022	2023 dan selanjutnya
30 Juni 2019							
Utang usaha dan lain-lain	15,943	(15,943)	(15,943)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	13,095	(13,095)	(13,095)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan (two-step loans)	850	(945)	(234)	(113)	(202)	(158)	(238)
Obligasi dan wesel bayar	10,483	(18,494)	(1,543)	(2,898)	(1,231)	(2,817)	(10,005)
Utang bank	39,496	(48,721)	(12,904)	(3,634)	(10,049)	(5,058)	(17,076)
Pinjaman lainnya	3,941	(4,951)	(738)	(575)	(1,093)	(1,019)	(1,526)
Utang sewa pembiayaan	2,733	(3,219)	(994)	(474)	(772)	(595)	(384)
Jumlah	86,541	(105,368)	(45,451)	(7,694)	(13,347)	(9,647)	(29,229)
	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2019	2020	2021	2022	2023 dan selanjutnya
31 Desember 2018							
Utang usaha dan lain-lain	15.214	(15.214)	(15.214)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	12.769	(12.769)	(12.769)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan (two-step loans)	949	(1.075)	(242)	(232)	(205)	(159)	(237)
Obligasi dan wesel bayar	10.481	(19.050)	(1.562)	(3.436)	(1.231)	(2.817)	(10.004)
Utang bank	27.268	(33.363)	(10.434)	(9.160)	(3.991)	(3.219)	(6.559)
Pinjaman lainnya	2.244	(2.905)	(490)	(570)	(533)	(495)	(817)
Utang sewa pembiayaan	3.145	(3.764)	(1.049)	(945)	(781)	(605)	(384)
Liabilitas lainnya	261	(306)	(16)	(36)	(36)	(109)	(109)
Jumlah	72.331	(88.446)	(41.776)	(14.379)	(6.777)	(7.404)	(18.110)

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2019	Arus kas	Perubahan non tunai			30 Juni 2019
			Akuisisi	Perubahan valuta asing	Sewa baru	
Utang bank jangka pendek	4.043	470	-	-	-	4.517
Pinjaman penerusan (two step loan)	949	(98)	-	(1)	-	850
Obligasi dan wesel bayar	10.481	-	-	-	2	10.483
Utang bank jangka panjang	23.225	11.401	378	(30)	-	34.979
Pinjaman lainnya	2.244	1.697	-	-	-	3.941
Utang sewa pembiayaan	3.145	(435)	-	-	23	2.733
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	44.087	13.035	378	(31)	23	57.503

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	4.517	2,98%	4.043	2,83%
Utang jangka panjang	52.986	34,99%	40.044	28,00%
Total utang	57.503	37,97%	44.087	30,83%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	93.949	62,03%	98.910	69,17%
Jumlah	151.452	100,00%	142.997	100,00%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Jumlah utang dengan bunga	57.503	44.087
Dikurangi: kas dan setara kas	(17.075)	(17.439)
Utang bersih	40.428	26.648
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	93.949	98.910
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	43,03%	26,94%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 16, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh kreditor. Selama enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah mematuhi persyaratan permodalan yang diberikan oleh pihak eksternal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2019 dan untuk Periode Enam Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	5.705	4.741
Sewa pembiayaan	26	254
Kapitalisasi bunga	51	23
Penambahan aset tak berwujud melalui:		
Utang usaha	90	228